



KORUPSI DARI PERSPEKTIF GENDER ASIA PASIFIK

KORUPSI DARI PERSPEKTIF GENDER ASIA PASIFIK

Transparency International adalah sebuah gerakan global dengan satu visi: dunia dimana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan kehidupan sehari-hari yang bebas dari korupsi. Dengan lebih dari 100 cabang di seluruh dunia dan sekretariat internasional di Berlin, kami memimpin perang melawan korupsi untuk mengubah visi ini menjadi kenyataan.

www.transparency.org

Korupsi dari Perspektif Gender

Asia dan Pasifik

Penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa keterlibatan dan dukungan dari chapter Transparency International di Kamboja, Fiji, Indonesia, dan Sri Lanka.

Ukuran 18 x 25 cm, halaman : x + 52

Penulis: Dr Caryn Peiffer

Pengulas: Marie Chene, Ilham Mohamed, Roberto Kukutschka

Sampul: Shutterstock

Tata Letak : Taqi

Ilustrasi: Burak Korkmaz

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada tanggal 22/11/2023. Namun demikian, Transparency International tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

ISBN: 978-3-96076-246-1

2023 Transparency International. Kecuali disebutkan lain, karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-ND 4.0 DE. Kutipan diizinkan. Silakan hubungi Transparency International - copyright@transparency.org - mengenai permintaan derivatif.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	v
1 - PENDAHULUAN	1
2 - BAGAIMANA GENDER MEMPENGARUHI PENGALAMAN KORUPSI	5
3- GENDER & RESPON GCB DI ASIA PASIFIK: TEMUAN UTAMA	11
4 - METODOLOGI UNTUK KELOMPOK DISKUSI	23
5 - NORMA-NORMA GENDER DAN EKSPEKTASI PEREMPUAN	27
6 - PERLAKUAN BERDASARKAN GENDER OLEH PEJABAT PUBLIK DAN PENGALAMAN KORUPSI	31
7 - DINAMIKA GENDER DALAM PELAPORAN DAN PENOLAKAN UNTUK TERLIBAT DALAM KORUPSI	39
8 - REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN KESIMPULAN	43

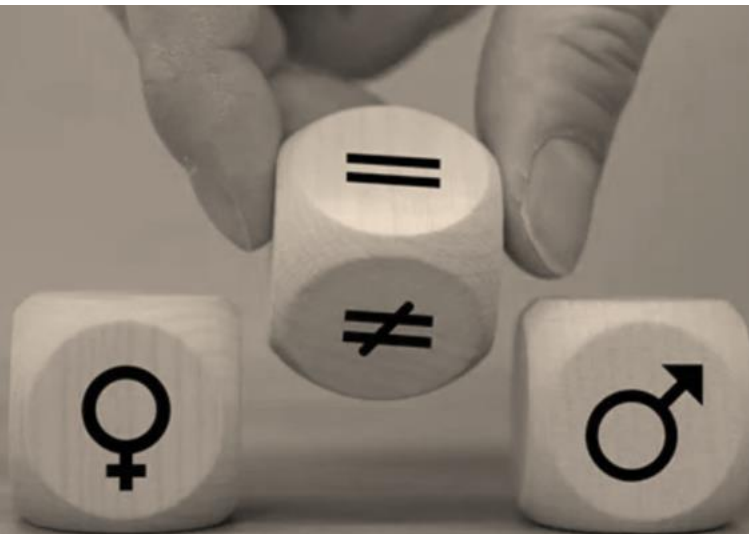


Credit Foto : florinroebig.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan temuan dari serangkaian diskusi kelompok terfokus/*Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta dari empat negara di Kawasan Asia Pasifik: Kamboja, Fiji, Indonesia, dan Sri Lanka.

Setiap diskusi bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap temuan-temuan kunci dari analisis data Global Corruption Barometer (GCB) Asia Pasifik yang meneliti hubungan antara gender dan sikap terhadap pengalaman dengan korupsi. Secara lebih luas, diskusi tersebut mengeksplorasi norma-norma gender, ketidaksetaraan, dan bagaimana gender membentuk pengalaman masyarakat dengan pejabat publik. Temuan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender diperburuk oleh korupsi sekaligus menghambat upaya pemberantasan korupsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak dapat dikendalikan secara efektif di wilayah-wilayah ini tanpa melihat bagaimana korupsi bersifat gender.



Credit Foto : genderjustice.org

A black and white photograph of a hand, palm facing up, with text painted on it. The text is arranged in four lines: 'STOP!' on the first line, 'GENDER-' on the second, 'BASED' on the third, and 'CORRUPTION' on the fourth. The hand is set against a dark background.

STOP!
GENDER-
BASED
CORRUPTION

Tema kunci dalam Diskusi Kelompok Terfokus

Norma-norma gender. Norma gender yang mengakar mendukung dominasi dan kepemimpinan laki-laki dan mendorong perempuan untuk pasif secara sosial dan mengambil peran di ranah domestik / pengasuhan. Norma gender ini mengakibatkan ketidaksetaraan gender secara lebih luas, dan menekankan pengalaman masyarakat dengan pejabat publik.

Pola korupsi. Perempuan memiliki sumber kerentanan unik yang menyebabkannya rentan terhadap korupsi dan cenderung menjadi korban *sextortion*. *Sexortion* melibatkan "permintaan implisit atau permintaan eksplisit kepada seseorang untuk terlibat dalam segala jenis aktivitas seksual yang tidak diinginkan sebagai imbalan atas penggunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang yang menduduki posisi otoritas".¹ Perempuan menghadapi tekanan yang berbeda dan berpotensi lebih besar untuk membayar suap atau terlibat dalam *sextortion*, terutama atas nama orang yang mereka sayangi. Mengingat stereotip gender yang menonjol, pejabat publik cenderung memandang perempuan sebagai "sasaran empuk."

Pengalaman interseksional. Orang-orang yang terpinggirkan berada dalam kelompok sosial yang secara sistemik dirugikan atas dasar ras, kelas, usia, etnis agama, kemampuan fisik, identifikasi gender, orientasi seksual dan/atau ciri-ciri kelompok lainnya. Sudut pandang interseksional memfokuskan pada bagaimana orang yang terpinggirkan dapat didiskriminasi atau dirugikan karena memiliki salah satu atau lebih dari ciri-ciri marginalisasi ini. Faktor-faktor interseksional seperti menjadi perempuan dan memiliki disabilitas, atau miskin, tinggal di daerah pedesaan, bekerja sebagai pekerja seks dan/atau menjadi bagian dari kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LGBTQI) dibahas dalam FGD sebagai pengalaman unik yang membentuk pengalaman dengan pejabat publik dan korupsi. Beberapa kelompok perempuan yang terpinggirkan menjadi sasaran *sextortion* secara tidak proporsional dan kecil kemungkinannya untuk menentang atau melaporkan permintaan untuk terlibat dalam korupsi.

¹ Camacho, G. (2021). *Corruption and Gender Inequality* (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre).

Melaporkan korupsi. Norma gender mempengaruhi kesediaan untuk melaporkan tindakan korupsi. Laki-laki sering kali diasosiasikan memiliki sifat konfrontatif dan perempuan pasif. Oleh sebab itu, laki-laki mungkin lebih nyaman untuk melaporkan korupsi. Tanggung jawab pengasuhan juga dapat melemahkan pelaporan: perempuan mungkin enggan untuk melaporkan karena takut apabila pelaporannya membahayakan akses terhadap layanan untuk keluarga mereka di masa depan.

Menolak untuk terlibat dalam korupsi. Untuk alasan yang serupa, norma-norma gender juga mempengaruhi penolakan untuk terlibat dalam korupsi. Menolak terlibat dalam korupsi dapat melibatkan tantangan terhadap pejabat publik, yang merupakan sifat yang umumnya lebih dihargai pada laki-laki daripada perempuan. Sekali lagi, perempuan yang memikul tanggung jawab pengasuhan mungkin khawatir jika menolak untuk terlibat dalam korupsi akan mengurangi akses keluarga mereka terhadap layanan.

Kesadaran akan hak-hak dan lembaga akuntabilitas. Analisis GCB Asia menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk sadar atas hak mereka untuk meminta informasi dari lembaga publik, dan komisi anti-korupsi di negara mereka. Menurut temuan ini, FGD menunjukkan bahwa perempuan yang sibuk mengurus tanggung jawab rumah tangga cenderung tidak memiliki waktu untuk mencari informasi semacam ini. Sebaliknya, laki-laki lebih cenderung memprioritaskan hal-hal semacam itu mengingat ekspektasi sosial yang lebih tinggi sehingga mendorong mereka untuk melakukannya. Sistem ketidaksetaraan yang lebih luas kemungkinan juga memainkan peran. Misalnya, FGD mencatat bahwa perempuan pedesaan secara tidak proporsional buta huruf, dan akibatnya kurang menyadari hak-hak mereka untuk meminta informasi dan menuntut akuntabilitas.

Tantangan unik dalam melaporkan *sextortion*. Berdasarkan FGD, *sextortion* sering kali tidak dilaporkan karena sulit untuk dibuktikan, korban takut diviktimisasi oleh pihak berwenang, dan ada rasa malu serta stigma yang menyelimuti viktimisasi. Korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat melaporkan *sextortion* sebagai bentuk suap atau korupsi.

Pelaporan *sextortion* dalam survei. Meskipun penelitian tentang *sextortion* memperjelas bahwa perempuan menjadi sasaran secara tidak proporsional, analisis data GCB Asia Pasifik menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melaporkan bahwa mereka pernah mengalami *sextortion*. Berkaca dari temuan-temuan ini, beberapa peserta FGD menyatakan bahwa laki-laki lebih umum untuk mendiskusikan seks di ruang publik daripada perempuan. Akibatnya, laki-laki mungkin memiliki lebih banyak kesadaran tentang *sextortion* dan/atau lebih nyaman membahasnya dengan enumerator survei.

Beberapa pelajaran yang muncul dari temuan studi ini dapat membantu mereka yang bekerja untuk mengendalikan korupsi dan menghilangkan ketidaksetaraan gender di Asia Pasifik. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pemerintah harus:

- Membuat pelaporan korupsi yang peka gender, aman, dan dapat diakses oleh semua kelompok perempuan.
- Berinvestasi pada respon pelaporan dan sumber daya yang “peka terhadap *sextortion*” sehingga perempuan korban *sextortion* mendapat panduan yang jelas tentang pelaporan, biaya yang dibutuhkan, dan dukungan cepat pelaporan dari berbagai layanan yang dibutuhkan oleh para penyintas kekerasan seksual.
- Mempertimbangkan untuk mempromosikan keseimbangan gender di antara personel di sektor dan kegiatan yang rentan terhadap *sextortion*
- Mengembangkan kerangka hukum untuk *sextortion* guna memungkinkan penuntutan kasus-kasus dan menyediakan pelatihan khusus bagi para pejabat tentang *sextortion*

Para aktor kebijakan anti-korupsi dan masyarakat sipil harus:

- Membedayakan perempuan—khususnya perempuan yang terpinggirkan—dalam sistem anti korupsi dan sistem tata kelola lainnya. Upaya ini harus berkontribusi pada penciptaan solusi yang peka terhadap pengalaman hidup perempuan.
- Mempertimbangkan pengembangan strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang *sextortion*, menantang stereotip dan norma gender di kalangan masyarakat dan pejabat publik, dan menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka atas layanan, akses atas informasi dan saluran pelaporan korupsi. Pesan harus dirancang dan diuji dengan hati-hati sebelum disebarluaskan. Untuk *sextortion*, para pelaku kebijakan harus mengambil pelajaran dari upaya peningkatan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender.

- Mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan interseksional ketika gender diarusutamakan ke dalam upaya anti korupsi. Pengarusutamaan gender yang efektif membutuhkan pertimbangan gender di seluruh tahapan kebijakan dari intervensi anti korupsi. Hal ini mungkin akan bervariasi di berbagai wilayah karena terdapat perbedaan dalam pengukuhan norma-norma gender dan dalam ketidaksetaraan yang dialami. Kebijakan perlu dirancang untuk mengatasi masalah-masalah spesifik di setiap negara agar sesuai dengan konteks wilayahnya.
- Bekerja sama dengan masyarakat sipil yang berfokus pada gender dan berupaya untuk menentang norma-norma gender yang mempengaruhi perilaku korupsi. Mengingat bahwa mengubah norma-norma sosial adalah tugas yang tidak mudah, koalisi yang berkembang dapat menjadi salah satu kunci permasalahan.

Untuk para peneliti:

- Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai gender dan korupsi di wilayah Asia Pasifik. Hal ini penting untuk mengembangkan inisiatif yang spesifik di setiap negara. Penelitian harus dibangun menggunakan metodologi laporan ini dan mengatasi keterbatasan-keterbatasannya bila memungkinkan.
- Siapapun yang mengelola survei tentang korupsi harus belajar dari evolusi penelitian tentang topik-topik sensitive lainnya. Mereka perlu menguji apakah strategi yang digunakan dalam bidang-bidang sensitive ini dapat diterapkan untuk mengukur dan memeriksa pengalaman perempuan terhadap korupsi dan *sextortion* secara lebih akurat.
- Diperlukan lebih banyak penelitian tentang tentang *sextortion* karena masih relatif langka. Penelitian sebaiknya berfokus pada dampak dari *sextortion* terhadap korban dan masyarakat, pola-pola khusus dari sektor-sektor tertentu, dan faktor-faktor yang memfasilitasi keberhasilan penuntutan.

PENDAHULUAN

Telah terbukti bahwa korupsi menghambat kemajuan pembangunan dan memperburuk ketidaksetaraan, dan dampaknya yang berbahaya berpengaruh secara tidak proporsional pada kehidupan mereka yang paling rentan di dunia.^{2 3}

Perempuan yang terpinggirkan—perempuan yang termasuk dalam kelompok sosial yang secara sistemik dirugikan—diakui secara unik rentan terhadap korupsi, dan secara tidak proporsional terkena dampak negatifnya.⁴ Hubungan timbal balik antara ketidaksetaraan gender dan korupsi semakin signifikan di Asia Pasifik. Tingkat korupsi dan ketidaksetaraan gender masih sangat tinggi di banyak negara di kawasan ini. Seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, terdapat alasan untuk meyakini bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya diperburuk oleh korupsi, tetapi juga menggagalkan upaya pemberantasan korupsi.

Pengakuan yang lebih luas tentang sifat gender dari bahaya korupsi telah mendorong banyak seruan terhadap pendekatan anti korupsi yang lebih peka terhadap pengalaman perempuan dalam korupsi.⁵ Laporan ini merekomendasikan untuk meningkatkan sensitivitas gender di Asia Pasifik. Pengarusutamaan gender ke dalam program anti korupsi secara umum harus mengarah pada efektivitas yang lebih dan secara khusus dalam jenis dan pola korupsi yang berdampak pada perempuan secara tidak proporsional. Namun, upaya-upaya tersebut membutuhkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pengalaman korupsi bersifat gender dalam konteks-konteks tertentu.

² Bullock, J. and Jenkins, M. (2019). *Corruption and marginalisation* (Transparency International).

³ Chêne, M. (2014). *The Impact of corruption on growth and inequality* (Berlin: Transparency International).

⁴ Kubbe, I. and Merkle, O. eds. (2022). *Norms, Gender and Corruption: Understanding the Nexus* (Edward Elgar Publishing).

⁵ Camacho, G. (2021).

Merkle dan Kubbe⁶ mengamati bahwa penelitian tentang gender dan korupsi telah berkembang selama dua dekade terakhir, namun baru belakangan ini mulai fokus pada dampak gender dan pengalaman korupsi. Isu-isu ini telah dibahas secara luas, dengan diskusi tentang sifat gender korupsi bagi perempuan di berbagai konteks.⁷ Meskipun penting untuk menyoroti pengalaman bersama, pemeriksaan semacam itu beresiko menutupi cara-cara bagaimana norma gender membentuk pengalaman korupsi dalam situasi tertentu. Di samping itu, penelitian tentang gender dan korupsi sampai saat ini utamanya didasarkan pada pemahaman biner tentang gender. Sehingga buta terhadap bagaimana faktor-faktor interseksional membentuk kerentanan perempuan terhadap korupsi. Faktor-faktor interseksional seperti ras, kelas, usia, etnis, agama, dan fisik sangat mungkin membuat perempuan rentan terhadap korupsi. Akibatnya, kesenjangan penelitian yang persisten ini tetap menjadi suatu kekurangan yang mencolok.⁸ Di Asia Pasifik, hanya ada segelintir penelitian yang sangat baru tentang pengalaman perempuan dalam menghadapi korupsi. Penelitian-penelitian tersebut sangat berguna untuk mengungkap bagaimana gender membentuk kerentanan dan pengalaman perempuan dengan korupsi di Myanmar dan Kepulauan Solomon.⁹



⁶ Merkle, O. and Kubbe, I. (2022). Moving forward: including norms in the research agenda on gender and corruption. *Norms, Gender and Corruption: Understanding the Nexus*, Halaman. 268.

⁷ Merkle, O. and Kubbe, I. (2022).

⁸ Camacho, G. (2021).

⁹ UNODC Pacific (2022). *Breaking the Silence on Gender and Corruption in the Pacific*. Information note.

Laporan ini disusun atas dasar perhatian regional yang baru muncul dengan menggunakan pendekatan yang secara eksplisit bersifat komparatif. Laporan ini mengacu pada dua sumber data. Pertama, laporan ini merangkum temuan-temuan utama dari analisis GCB Transparency Internasional di Asia Pasifik yang mengeksplorasi bagaimana gender dikaitkan dengan pengalaman dan persepsi di kawasan ini.

Secara lebih substantif, laporan ini membahas temuan-temuan dari serangkaian sepuluh FGD. Diskusi-diskusi ini menghimpun pandangan dari 139 peserta dari empat negara Asia Pasifik: Kamboja, Fiji, Indonesia, dan Sri Lanka. FGD ini mengeksplorasi lebih jauh tentang sikap dan pengalaman gender dengan pejabat publik dan pengalaman para pejabat di wilayah-wilayah tersebut. FGD tersebut berfokus pada norma dan ekspektasi gender masing-masing wilayah; pengalaman berhadapan dengan pejabat publik di mana korupsi dan pelaporan korupsi bersifat gender; pandangan-pandangan yang menjadi penyebab terjadinya *sextortion*; dan sejauh mana kesadaran terhadap *sextortion* bersifat gender. Beberapa wawasan mendalam muncul dari diskusi-diskusi ini. Para peserta membuat hubungan yang jelas antara penyebab ketidaksetaraan gender dan korupsi di negara mereka. Di berbagai negara, FGD menunjukkan bahwa banyak dinamika gender yang serupa membentuk kerentanan-kerentanan terhadap korupsi dan pengalaman orang-orang saat berhadapan dengan pejabat publik. Beberapa temuan spesifik negara juga menjadi sorotan, termasuk cara-cara kelompok perempuan tertentu—seperti perempuan pedesaan, perempuan miskin, perempuan penyandang disabilitas dan pekerja seks—memiliki pengalaman unik yang membuatnya rentan terhadap korupsi dan sering kali paling tidak berdaya untuk menuntut akuntabilitas. Temuan-temuan ini selanjutnya menggarisbawahi perlunya menyesuaikan pengarus-utamaan gender dalam kerja anti korupsi dalam konteks yang spesifik.

Bagian selanjutnya dari laporan ini mengulas literatur yang relevan. Fokusnya adalah penelitian yang mengkaji bagaimana gender berdampak pada pengalaman dan dampak korupsi. Selanjutnya, temuan-temuan kunci dari GCB di Asia Pasifik diamati. Laporan ini juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemangku kepentingan saat merespon temuan-temuan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini menginspirasi beberapa pertanyaan yang dibahas dalam FGD. Laporan ini kemudian menjelaskan metodologi yang digunakan untuk melakukan FGD dan membahas temuan-temuan dari serangkaian diskusi tersebut. Bagian kesimpulan berpusat pada rekomendasi kebijakan dan pelajaran yang disarikan dari analisis.

B. PENGALAMAN DENGAN PEJABAT PUBLIK

Konteks:

Pejabat publik terkadang meminta suap atau pembayaran ekstra sebagai imbalan atas pelayanan publik. Untuk beberapa layanan, data kami menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemungkinan yang sama untuk diminta suap dari pejabat publik. Namun, jenis pengalaman ini mungkin terasa berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

4. Bagaimana perbedaan pengalaman diminta suap oleh pejabat publik bagi laki-laki dan perempuan?



2

BAGAIMANA GENDER MEMPENGARUHI PENGALAMAN KORUPSI

Menurut Kubbe dan Merkle, penelitian baru-baru ini berfokus pada dampak dan pengalaman gender terkait korupsi.¹⁰

Pemeriksaan sebelumnya tentang gender dan korupsi umumnya didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang gender mana yang cenderung lebih korup dan apakah tingkat korupsi yang tinggi diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi politik.^{11 12 13 14 15} Namun, banyak dari eksplorasi ini cenderung memperkuat stereotip gender. Temuan bahwa representasi gender dikaitkan dengan tingkat yang lebih rendah dari beberapa ukuran korupsi sering ditafsirkan dengan menempatkan perempuan sebagai “kekuatan anti korupsi,” dengan asumsi bahwa perempuan “tidak terlalu egois, lebih mudah dipercaya, mampu berempati, penyayang, dermawan, berjiwa sosial atau altruistik daripada laki-laki.”¹⁶

¹⁰ Kubbe, I. and Merkle, O. (2022).

¹¹ Dollar, D., Fisman, R. and Gatti, R. (2001) Are women really the “fairer” sex? Corruption and women in government. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 46(4), Halaman. 423-429.

¹² Grimes, M. and Wängnerud, L. (2018). Gender and Corruption in Mexico: Building a Theory of Conditioned Causality. *Gender and Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research*, Halaman. 191-211.

¹³ Grimes, M. and Wängnerud, L. (2018). Gender and Corruption in Mexico: Building a Theory of Conditioned Causality. *Gender and Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research*, Halaman. 191-211.

¹⁴ Stockemer, D., (2011). Women's parliamentary representation in Africa: the impact of democracy and corruption on the number of female deputies in national parliaments. *Political Studies*, 59(3), Halaman. 693-712.

¹⁵ Swamy, A., Knack, S., Lee, Y. and Azfar, O., (2001). Gender and corruption. *Journal of development economics*, 64(1), Halaman. 25-55.

¹⁶ Kubbe, I. and Merkle, O. (2022).

Sebaliknya, penelitian terkini berusaha untuk secara eksplisit memahami bagaimana norma-norma gender yang didukung oleh peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya dan tidak tertanam secara seragam di berbagai konteks membentuk pengalaman yang dimiliki individu dengan pejabat publik, pemegang kekuasaan lainnya, dan korupsi.^{17 18 19 20} Penelitian tersebut menantang anggapan bahwa perbedaan gender dalam pengalaman korupsi adalah bawaan biologis perempuan atau laki-laki. Penelitian tersebut juga mengakui bahwa hubungan antara gender dan korupsi tergantung pada konteks. Sentralitas norma-norma gender dalam penelitian yang muncul telah membantu bidang ini untuk mulai beralih dari apa yang hampir menjadi fokus eksklusif “pada konsepsi biner gender menuju perhatian khusus pada pengalaman perempuan dan anak-anak perempuan.”²¹ Secara menjanjikan, perhatian kini mulai berpusat pada bagaimana bentuk-bentuk feminitas dan maskulinitas membentuk pengalaman dengan korupsi^{22 23} dan pengalaman unik yang dimiliki oleh individu transgender serta non-biner.^{24 25}

Norma gender dan pengalaman korupsi

Norma-norma gender dianggap sebagai kunci perbedaan dalam tekanan yang diterima oleh orang biasa untuk terlibat dalam korupsi. Menurut Hossain dkk.,²⁶ karena pengalaman yang sama dengan sosialisasi peran gender, perempuan secara global sangat mungkin untuk memikul tanggung jawab pengasuhan keluarga. Akibatnya, mereka mungkin merasa tertekan untuk terlibat dalam korupsi atas

¹⁷ Kubbe, I. and Merkle, O. (2022).

¹⁸ Bjarnegård, E. (2018). Focusing on Masculinity and Male-Dominated Networks in Corruption. In: Stensöta H., Wängnerud L. (eds) *Gender and Corruption. Political Corruption and Governance* (Palgrave Macmillan).

¹⁹ Portillo, H. and Molano, S. (2017). 'Masculinity, machismo and corruption', *Voice Male*, 25 June. <https://voicemalemagazine.org/masculinity-machismo-corruption>.

²⁰ Lindberg, H. and Stensöta, H. (2018). Corruption as exploitation: Feminist exchange theories and the link between gender and corruption. *Gender and Corruption: Historical Roots and New Avenues for Research*, Halaman. 237-256.

²¹ Camacho, G. (2021).

²² Bjarnegård, E. (2018).

²³ Portillo, H. and Molano, S.

²⁴ McDonald, E., Jenkins, M. and Fitzgerald, J. (2021). *Defying Exclusion: Stories and insights on the links between discrimination and corruption* (Berlin: Transparency International).

²⁵ France, G. (2022). *The impacts of corruption on LGBTQI+ rights* (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre. Chr Michelsen Institute, U4 Helpdesk Answer).

²⁶ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010). *Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connection* (UNDP and UNIFEM).

nama orang-orang yang mereka rawat.²⁷ Steretip gender tertentu yang tertanam dan mengakar di beberapa bagian dunia mendorong perempuan untuk pasif secara sosial. Karena itu, perempuan dapat dilihat sebagai target yang "empuk" atau menjadi sasaran korupsi karena mereka dianggap cenderung tidak mempertanyakan permintaan suap atau melaporkannya.²⁸ Di Asia Pasifik, norma-norma gender bermasalah yang serupa telah diidentifikasi dan disebut sering mendukung "dominasi laki-laki, kekerasan dan ketegasan namun membatasi (perempuan dan) anak-anak perempuan pada peran domestik dan reproduktif".²⁹

Di samping itu, penelitian yang sedang berkembang tentang *sextortion* mencerminkan pengakuan yang muncul bahwa perempuan juga sering kali menjadi "...subjek dan objek dari berbagai praktik dan perilaku korup yang berbeda".³⁰ *Sextortion* melibatkan "permintaan implisit atau eksplisit kepada seseorang untuk terlibat dalam segala jenis aktivitas seksual yang tidak diinginkan sebagai imbalan untuk menjalankan tugas bagi seseorang yang menduduki posisi berwenang.³¹ Perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban dalam bentuk korupsi ini.³² Individu transgender dan non-biner juga mungkin menjadi sasaran secara tidak proporsional.³³ Dalam diskusi ini, norma-norma gender diakui memainkan peran penting dalam menumbuhkan *sextortion*. Misalnya, norma-norma yang mendorong perilaku agresif secara seksual pada laki-laki berkontribusi terhadap munculnya kejahatan, sedangkan norma-norma yang mendorong kesucian dan kesopanan seksual pada perempuan berkontribusi terhadap impunitas di sekitar masalah ini.³⁴

²⁷ Goetz, A. M. (2007). Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? *Development and Change*, 38(1).

²⁸ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

²⁹ UNICEF (2019). *Gender Counts: A quantitative assessment of gender inequality and its impact on girls and boys in East and Southeast Asia* (Bangkok: UNICEF).

³⁰ Sida (2015). *Gender and Corruption. Gender Toolbox Brief* (Sida).

³¹ Camacho, G. (2021).

³² Lindberg, H. and Stensöta, H. (2018).

³³ Feigenblatt, H. (2020). *Breaking the silence around sextortion: the links between power, sex and corruption* (Berlin: Transparency International).

³⁴ Bjarnegård, E., Calvo, D., Eldén, Å. and Lundgren, S. (2022). *Sextortion: Corruption shaped by gender norms. Norms, Gender and Corruption: Understanding the Nexus*, Halaman. 252.

Penelitian terkini telah mengungkap bagaimana pengaruh antara norma gender dan ketidaksetaraan membentuk pengalaman dengan pejabat publik.^{35 36} Perempuan marginal masuk dalam kelompok sosial yang dirugikan secara sistemik, atas dasar ras, golongan, umur, suku, agama, kemampuan fisik dan/atau ciri penentu lainnya. Perempuan marginal terdampak secara tidak proporsional dan unik oleh korupsi. Penelitian tentang dampak posisi unik perempuan di masyarakat dan korupsi masih relatif baru dan belum lengkap. Sebagian besar fokus penelitian tertuju pada perempuan miskin, daripada pengalaman interseksional yang mungkin membentuk kerentanan terhadap korupsi dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam konteks penelitian mengenai perempuan miskin, mereka dianggap rentan terhadap korupsi karena beberapa alasan. Perempuan miskin tidak mampu membayar layanan privat sehingga mereka bergantung pada layanan yang disediakan oleh negara. Ketergantungan ini meningkatkan kemungkinan dimintai suap dari layanan tersebut.^{37 38} Selain itu, perempuan miskin dianggap rentan terhadap korupsi karena banyak di antara mereka yang buta huruf dan tidak menyadari hak-haknya.³⁹ Terlebih, mereka juga tidak memiliki posisi tawar yang kuat jika dihadapkan dengan pejabat yang korup.⁴⁰



Credit Foto : goldenageofgaia.com

³⁵ Camacho, G. (2021).

³⁶ Bullock, J. and Jenkins, M. (2019).

³⁷ Peiffer, C. and Rose, R. (2018). Why are the poor more vulnerable to bribery in Africa? The institutional effects of services. *The Journal of Development Studies*, 54(1): 18-29.

³⁸ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

³⁹ UNDP (2012). *Seeing beyond the state: Grassroots women's perspectives on corruption and anticorruption* (UNDP).

⁴⁰ Bullock, J. and Jenkins, M. (2019).

Gender, ketidaksetaraan interseksional, dan dampak korupsi

Dengan melanggengkan akses yang tidak setara terhadap kekuasaan dan sumber daya, korupsi semakin memperparah ketidaksetaraan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender dan interseksional. Hubungan antara korupsi dan ketidaksetaraan gender memiliki dampak signifikan di Asia Pasifik karena wilayah-wilayah ini terus berjuang untuk mengatasi kesenjangan antara gender dalam berbagai aspek. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa populasi miskin di Asia Pasifik sebagian besar adalah perempuan.⁴¹

Penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan, terutama perempuan marginal, sangat rentan terhadap dampak negatif dari korupsi.^{42 43} Korupsi merugikan prospek pembangunan dan meningkatkan biaya terkait barang dan layanan dasar yang disediakan oleh negara, yang mana beberapa kelompok perempuan marginal bergantung padanya.⁴⁴ Di samping itu, karena korupsi merusak supremasi hukum, maka perlu dipastikan agar hak-hak perempuan dan hak kelompok marginal secara umum dipenuhi dan dilindungi.^{45 46 47}

Penelitian juga menyoroti bagaimana ketidaksetaraan gender muncul dalam pengalaman langsung dengan negara. Ketika perempuan terutama yang miskin tidak mampu membayar suap, mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pelecehan fisik dan *sextortion*.^{48 49} Karena perempuan mungkin takut dengan pelecehan semacam itu, mereka terpaksa tidak memperoleh layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum.^{50 51} Fakta-fakta ini berkontribusi pada ketidaksetaraan gender yang semakin mengakar. Pola semacam ini juga berlaku untuk non-biner dan transgender.

⁴¹ UN Women (2023). Focus area: Women, Poverty and Economics. Asia Pacific.

⁴² Boehm, F. and Sierra, E. (2015). The gendered impact of corruption: Who suffers more – men or women? U4 Brief 4 (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre).

⁴³ Merkle, O. (2018). The myth of gender-neutral power: corruption and gender norms. Doctoral thesis, Maastricht University (Boekenplan). <https://doi.org/10.26481/dis.20181205om>

⁴⁴ World Bank (2023). Combatting corruption. Brief.

⁴⁵ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

⁴⁶ France, G. (2022).

⁴⁷ Jenkins, M. and McDonald, E (2022). Corruption and the equal enjoyment of rights for persons with disabilities. (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr Michelsen Institute, U4 Helpdesk Answer).

⁴⁸ Sida, (2015). Gender and Corruption. Gender Toolbox Brief (Sida).

⁴⁹ UNDP (2012). Seeing beyond the state: Grassroots women's perspectives on corruption and anticorruption (UNDP).

⁵⁰ Kubbe, I. and Merkle, O. (2022).

⁵¹ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

Penting untuk mempertimbangkan dampak yang diakibatkan oleh *sextortion*. Seperti yang disebutkan di atas, perempuan jauh lebih mungkin menanggung konsekuensi sebagai korban. Sebagai bentuk pelecehan seksual, banyak korban *sextortion* yang menderita trauma fisik dan psikologis.^{52 53 54} *Sextortion* dapat menyebabkan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan di usia dini. Selain itu, Para korban harus menanggung rasa malu yang mendalam dan konsekuensi lainnya seperti dikeluarkan dari sekolah, rumah, atau dari komunitasnya.⁵⁵ Akibatnya, korban sering kali enggan melaporkan *sextortion* yang pada akhirnya berkontribusi pada impunitas pelaku.⁵⁶

Semakin banyak perhatian yang ditujukan pada “nexus gender dan korupsi,” tetapi banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengeksplor dampak dari berbagai pengalaman interseksional. Harus diakui bahwa norma-norma gender dan hubungannya dengan korupsi sangat tergantung pada konteks. Penelitian lebih lanjut tentang *sextortion* juga diperlukan. Ketakutan, rasa malu, dan stigma yang dialami oleh korban *sextortion* menjadi penghambat untuk meneliti, mengukur, dan merekam fenomena tersebut secara sistematis. Hal ini sangat penting karena membentuk pemahaman kita tentang sifat gender pada korupsi secara lebih luas. Riset akan tetap tidak lengkap dan mungkin tidak memperhitungkan gender secara eksplisit jika tidak melihat fakta bahwa perempuan secara tidak proporsional cenderung dipaksa membayar suap dengan aktivitas seksual dan cenderung tidak melaporkan viktimisasi semacam itu kepada petugas atau enumerator survei.^{57 58} Isu yang terakhir dibahas secara lebih detail dalam bagian berikutnya, yang membahas bagaimana dan sejauh mana data survei memberikan gambaran tentang sifat gender korupsi.

⁵² Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

⁵³ Feigenblatt, H. (2020).

⁵⁴ Camacho, G. (2021).

⁵⁵ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

⁵⁶ Bjarnegård, E., Calvo, D., Eldén, Å. and Lundgren, S. (2022).

⁵⁷ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

⁵⁸ Rheinbay, J. and Chêne, M. (2016). Gender and Corruption Topic Guide (Berlin: Transparency International).

3

GENDER & RESPON GCB DI ASIA PASIFIK: TEMUAN UTAMA

GCB Transparency International menyajikan data survei yang paling komprehensif untuk menguji pengalaman dan sikap yang dilaporkan terkait korupsi dan anti korupsi

Gelombang terbaru di wilayah Asia dilaksanakan antara Maret 2019 dan September 2020. Totalnya, 19.416 orang dewasa dari 17 negara ikut terlibat. Transparency Internasional memulai GCB gelombang pertama di wilayah Pasifik dari bulan Februari hingga Maret 2021. 10 negara di Pasifik disurvei dengan melibatkan 6.000 orang dewasa.⁵⁹ Hasil dari kedua gelombang ini dianalisis untuk mengetahui apakah dan bagaimana gender memiliki keterkaitan dengan sikap dan pengalaman korupsi dan anti korupsi.⁶⁰ ⁶¹Temuan kunci dari analisis tersebut dirangkum dalam bagian ini. FGD mengeksplorasi lebih lanjut beberapa temuan kunci ini.



⁵⁹ Survei ini mewakili sebagian besar negara di Asia secara nasional. Di sebagian besar negara di Pasifik, survei ini menjangkau masyarakat dari seluruh wilayah. Ini merupakan pencapaian yang mengesankan mengingat konteks global pada saat itu. Karena Covid-19, dan di Pasifik karena tantangan geografis yang melekat pada wilayah tersebut, sebagian besar wawancara dilakukan melalui telepon, menggunakan panggilan digital acak.

⁶⁰ Peiffer, C. (2020). Gender Analysis of GCB findings in Asia. Unpublished report.

⁶¹ Peiffer, C. (2022). Gender Analysis of GCB findings in the Pacific. Unpublished report.

Persepsi terhadap korupsi dan anti korupsi

Analisis data GCB menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi dan upaya anti korupsi di wilayah tersebut pada umumnya tidak memiliki dimensi gender: perempuan dan laki-laki memiliki pandangan yang sangat mirip dan cenderung pesimis. Sebagian besar responden di wilayah ini percaya bahwa pemerintahan mereka diatur oleh beberapa kepentingan besar yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, dan bahwa korupsi merupakan masalah utama pemerintah. Di Asia, lebih dari sepertiga perempuan dan laki-laki menyakini bahwa korupsi semakin meningkat, dan mayoritas responden di Pasifik juga memiliki pandangan yang sama. Dalam persentase yang sama, perempuan dan laki-laki tidak setuju bahwa pemerintah emmpertimbangkan pandangan dari ornag-orang seperti mereka dalam pengambilan keputusan (33 persen di Asia dan hanya 14 persen di Pasifik). Selanjutnya, hampir sepertiga perempuan dan laki-laki di kedua wilayah tersebut meyakini bahwa pemerintah tidak berhasil dalam memerangi korupsi dan tidak setuju bahwa orang biasa dapat mengubah situasi ini.^{62 63}

Pengalaman dengan layanan publik

Data dari GCB memperjelas bahwa permintaan suap umum terjadi menurut perempuan maupun laki-laki di wilayah tersebut. Di Asia, hampir satu dari lima orang yang menggunakan layanan publik setahun sebelum survei melaporkan telah membayar suap. Di Pasifik, angkanya satu dari tiga orang. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kemungkinan membayar suap untuk sebagian besar layanan tidak terkait dengan jenis kelamin. Sebagai pengecualian, terdapat indikasi pola suap yang bersifat gender di data GCB Asia, di mana ditemukan bahwa perempuan cenderung membayar suap ketika mencari dokumen resmi. Perempuan yang tinggal di daerah pedesaan di Asia juga rentan membayar suap untuk mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki maupun perempuan di perkotaan.

⁶² Vrushi (2020). *Global Corruption Barometer Asia 2020: Citizens Views and Experiences of Corruption* (Berlin: Transparency International).

⁶³ Kukutschka (2021). *Global Corruption Barometer Pacific 2021: Citizens Views and Experiences of Corruption* (Berlin: Transparency International).

Di Pasifik, kesediaan untuk melaporkan suap tidak ada kaitannya dengan gender. Analisis serupa tidak dilakukan dengan data GCB Asia. Di Pasifik, hanya satu dari delapan responden yang membayar suap dalam dua belas bulan sebelumnya mengatakan bahwa mereka melaporkannya kepada otoritas. Di Asia, hanya satu dari empat belas responden yang mengatakan bahwa mereka melaporkan suap.

Meskipun hasilnya tentu bermanfaat, namun hasil tersebut tidak konsisten dengan kesan yang diberikan oleh literatur lebih luas tentang korupsi dan gender. Temuan tersebut sebagian besar menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan yang sama terhadap permintaan suap di wilayah tersebut. Namun, seperti yang telah diulas di atas, responden lainnya menyatakan bahwa perempuan secara unik rentan terhadap permintaan suap, terutama dari sektor kesehatan dan pendidikan.⁶⁴ ⁶⁵ Selain itu, status perempuan yang relative terpinggirkan dalam masyarakat berarti bahwa mereka dianggap sebagai "sasaran empuk" untuk korupsi secara umum.

Sehubungan dengan tingkat suap yang diperkirakan dari data GCB, beberapa orang berpendapat bahwa survei seperti GCB mungkin secara tidak sengaja meremehkan kerentanan perempuan terhadap korupsi, sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci dalam kotak 1 dan 2. Apalagi mengingat formulir yang singkat, secara alami survey memiliki keterbatasan dalam untuk mengungkap sejauh mana perlakuan dari pejabat publik dan korupsi memang bersifat gender. Obsevasi ini menginspirasi fokus dalam FGD pada pertanyaan-pertanyaan berikut: Sejauh mana perempuan diperlakukan secara berbeda dalam interaksi semacam itu dan bagaimana? Bagaimana pengalaman dimintai suap, menolak suap, atau melaporkan suap berbeda bagi perempuan?

⁶⁴ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

⁶⁵ Goetz, A. M. (2007).

Pengalaman terpendam terkait *sextortion*

Survei di tingkat rumah tangga secara alamiah memiliki kemampuan yang terbatas dalam merekam sejauh mana penyuapan didasarkan pada gender. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena perempuan yang secara tidak proporsional dimintai suap dalam bentuk layanan seksual (*sextortion*). Karena rasa takut, malu, dan stigma yang dikaitkan dengan viktimisasi, para korban mungkin enggan untuk melaporkan pengalaman mereka kepada orang asing yang menyelenggarakan survei, terutama apabila enumerator surveinya adalah seorang laki-laki. Di samping itu, kesadaran tentang *sextortion* secara global masih cukup rendah. Para korban mungkin tidak mengidentifikasi *sextortion* sebagai suatu bentuk penyuapan atau korupsi. Mengingat paksaan psikologis seringkali melibatkan *sextortion*, para korban mungkin tidak mengidentifikasi pengalaman pribadinya dengan label *sextortion*, bahkan ketika mereka mengetahui tentang fenomena tersebut. Karena alasan-alasan ini, sebagian besar *sextortion* tetap tersembunyi dalam laporan statistik terkait korupsi, yang berarti bahwa cakupan korupsi yang didasarkan pada gender telah disepelekan.

Credit Foto : metronome.ge

Bias sensitivitas berdasarkan gender

Penelitian yang sedang berkembang berpendapat bahwa perempuan berpotensi lebih enggan untuk mengakui kepada enumerator survei bahwa mereka telah membayar suap ketika ditanya secara langsung. Agerberg⁶⁶ membandingkan perkiraan tingkat suap di Rumania dari suatu survei yang menanyai responden secara langsung perihal membayar suap, seperti yang dilakukan GCB, dan dari hasil *list experiment*. *List experiment* merupakan metodologi yang digunakan untuk meneliti isu-isu sensitif seperti penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, dan pembelian hak suara. Responden tidak diminta untuk mengungkapkan informasi secara langsung mengenai butir survei yang sensitif (dalam hal ini terkait penyuapan). Sebaliknya, para responden memberikan indikasi berapa banyak butir di dalam daftar yang berlaku pada diri mereka. Perkiraan suap dihasilkan dengan membandingkan jumlah rata-rata butir yang diindikasikan oleh dua kelompok yang terpilih secara acak, dengan hanya satu kelompok yang daftarnya memuat butir membayar suap kepada layanan publik. Tingkat suap kemudian diperkirakan dengan membandingkan jumlah rata-rata butir yang dilaporkan oleh masing-masing kelompok.

Agerberg⁶⁷ memperkirakan bahwa "tingkat suap *list experiment*" di kalangan perempuan sebanyak tiga kali lipat dari perkiraan yang menggunakan pertanyaan survei langsung. Hal ini mendukung gagasan bahwa kelompok perempuan dalam penelitiannya memang cenderung enggan untuk melapor kepada enumerator survei bahwa mereka telah membayar suap apabila ditanya secara langsung. Masih belum dapat ditentukan seberapa jauh penemuan-penemuan ini dapat digeneralisasi karena melampaui penelitian yang diselenggarakan. Meskipun demikian, apabila mengindikasikan tren yang lebih luas, penemuan ini menunjukkan bahwa survei yang menanyakan pengalaman penyuapan secara langsung benar-benar telah mengabaikan posisi perempuan sebagai korban dari penyuapan. Hal ini bukan merupakan kekhawatiran kecil: seluruh survei lintas-negara yang berupaya untuk mengukur tingkat penyuapan (termasuk GCB) mematuhi praktik terbaik internasional yang terkini, yang menyarankan agar survei dilakukan dengan menanyakan secara langsung tentang pengalaman penyuapan.⁶⁸

⁶⁶ Agerberg, M. (2022). Corrupted estimates? Response bias in citizen surveys on corruption. *Political Behavior*, 44(2): 653-678.

⁶⁷ Agerberg, M. (2022).

⁶⁸ UNODC Pacific (2022). Breaking the Silence on Gender and Corruption in the Pacific. Information note.

Sextortion

GCB juga menanyakan perihal *sextortion*. Karena GCB mengakui bahwa kemungkinan besar korban enggan untuk melaporkan pengalaman *sextortion* kepada enumerator survei, responden tidak ditanya secara langsung mengenai pengalaman pribadi mereka. GCB justru mengajukan pertanyaan: *"Terkait dengan pengalaman Anda sendiri atau pengalaman orang lain yang Anda kenal, seberapa sering, jika memang pernah, seorang pejabat publik menyiratkan baik secara terbuka atau dengan motif terselubung baik kepada Anda sendiri atau orang yang Anda kenal, bahwa mereka akan memberikan profit dari pemerintah sebagai imbalan atas layanan seksual?"* Satu dari sembilan orang di kawasan Asia dan, secara mengejutkan, lebih dari seperempat di kawasan Pasifik melaporkan bahwa mereka pernah mengalami *sextortion* atau mengenal seseorang yang mengalami hal tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang sangat besar di negara-negara di dua kawasan tersebut.

Tabel 1:
Tingkat *sextortion* tertinggi dan terendah di seluruh Asia dan Pasifik

Tingkat	Asia	%	Pasifik	%
Terendah	Jepang	2%	Tonga	5%
	Myanmar	3%	Samoa	10%
	Korea Selatan	3%	Fiji	11%
Tertinggi	Thailand	15%	PNG	51%
	Indonesia	12%	FSM	46%
	India	10%	Kepulauan Solomon	33%

Keterangan: Singkatan: Papua Nugini (PNG), Federasi Mikronesia (FSM).

*Sumber: GCB 2020 dari 15 negara di Asia (N: 16.637); GCB 2022 dari 8 negara di Pasifik (N: 5.130). Catatan: tiga negara dengan tingkat tertinggi dan terendah di masing-masing kawasan berdasarkan persentase orang yang pernah mengalami *sextortion* atau mengenal seseorang yang pernah mengalami hal tersebut.*

Penyusunan kata dalam pertanyaan turut mempertimbangkan sensitivitas topik, tetapi kemampuannya masih terbatas dalam mengukur tingkat *sextortion* secara akurat atau dalam menunjukkan pihak mana yang paling rentan di antara masyarakat. Hal ini disebabkan ketidakjelasan perihal apakah responden yang mengiyakan pertanyaan survei sedang membahas pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Selain itu, berbagai responden dalam jaringan sosial yang sama dapat melaporkan kasus *sextortion* yang sama pula. Hal ini dapat membantu menjelaskan alasan di balik tingginya tingkat laporan di beberapa negara di Pasifik (Gambar 1), di mana populasi yang relatif kecil dan jaringan sosial yang padat memberikan kesan bahwa "setiap orang saling mengenal satu sama lain". Hal ini mungkin saja terjadi bahwa, misalnya, orang-orang melaporkan suatu liputan berita mengenai kasus *sextortion* sebagai kasus *sextortion* yang dialami oleh "seseorang yang mereka kenal".



Penyusunan kata dalam pertanyaan turut mempertimbangkan sensitivitas topik, tetapi kemampuannya masih terbatas dalam mengukur tingkat *sextortion* secara akurat atau dalam menunjukkan pihak mana yang paling rentan di antara masyarakat. Hal ini disebabkan ketidakjelasan perihal apakah responden yang mengiyakan pertanyaan survei sedang membahas pengalaman pribadinya atau pengalaman orang lain. Selain itu, berbagai responden dalam jaringan sosial yang sama dapat melaporkan kasus *sextortion* yang sama pula. Hal ini dapat membantu menjelaskan alasan di balik tingginya tingkat laporan di beberapa negara di Pasifik (Gambar 1), di mana populasi yang relatif kecil dan jaringan sosial yang padat memberikan kesan bahwa "setiap orang saling mengenal satu sama lain". Hal ini mungkin saja terjadi bahwa, misalnya, orang-orang melaporkan suatu liputan berita mengenai kasus *sextortion* sebagai kasus *sextortion* yang dialami oleh "seseorang yang mereka kenal".

Terlepas dari batasan-batasan ini, cukup mencengangkan ketika mengetahui bahwa ada sedikit lebih banyak laki-laki di Asia dan Pasifik daripada perempuan yang melapor bahwa mereka pernah mengalami atau mengenal seseorang yang pernah mengalami *sextortion* (Gambar 1).⁶⁹ Bukti menunjukkan bahwa laki-laki, kelompok transgender dan gender *non-conforming* terdampak oleh *sextortion*. Meskipun demikian, jelas bahwa perempuan adalah kelompok yang ditarget secara sangat tidak proporsional.⁷⁰ Mengapa tingkat laki-laki yang melapor tentang pengalaman *sextortion* pribadi atau orang lain lebih tinggi daripada perempuan di kawasan Asia dan Pasifik?

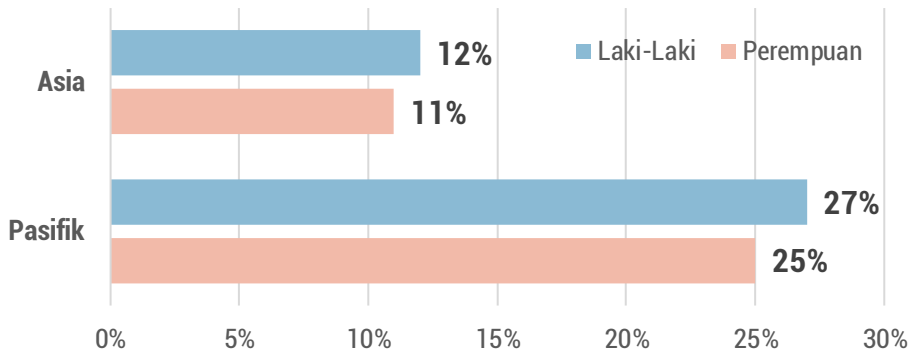


Credit Foto : U.S. Agency for International Development/Rawpixel

⁶⁹ Di Asia, hubungan antara gender dan laporan pengalaman atau mengetahui seseorang yang pernah mengalami pemerasan seks adalah signifikan (p -nilai < 0,05) setelah memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin menarik (menggunakan analisis regresi), sedangkan di Pasifik hubungan tersebut tidak signifikan.

⁷⁰ Feigenblatt, H. (2020).

Gambar 1.
Perbedaan gender dalam respons terhadap pertanyaan
perihal pengalaman sextortion



Sumber: GCB 2020 dari 15 negara di Asia (N: 16.637), GCB 2022 dari 8 negara di Pasifik (N: 5.130).

Salah satu kemungkinannya adalah terdapat potensi bahwa laki-laki lebih nyaman membahas perihal *sextortion* dengan enumerator survei daripada perempuan, sehingga lebih sering melakukan pelaporan. Terkait hal tersebut, laki-laki mungkin memiliki tingkat kesadaran isu yang lebih tinggi, meskipun kemungkinan mereka menjadi korban bisa jadi lebih kecil. Untuk memahami tren statistik ini, FGD membahas perihal isu terkait.



Kesadaran dan penggunaan hak atas informasi di Asia

Terakhir, di survei GCB Asia, untuk memahami kedalaman pengetahuan perempuan mengenai jalan keluar atas kasus korupsi, pertanyaan diberikan kepada para responden mengenai apakah mereka menyadari hak mereka untuk meminta informasi dari pemerintah, apakah mereka telah menghubungi badan publik untuk meminta informasi tersebut, dan apakah mereka tahu banyak soal komisi anti korupsi (ACC) milik negara. Pertanyaan analogis tidak diajukan di kawasan Pasifik. Dalam hal ini, analisis dari kumpulan respons mengungkapkan pola berdasarkan gender yang jelas. Pola-pola tersebut mengindikasikan bahwa perempuan di Asia cenderung tidak menyadari hak mereka untuk meminta informasi dari institusi publik. Lantas mungkin, sebagai akibatnya, perempuan cenderung tidak menggunakan hak ini. Akhirnya, perempuan menjadi kurang menyadari keberadaan komisi anti korupsi negara mereka. Pada titik ini, 64 persen dari mereka dilaporkan tidak tahu-menahu soal ACC milik negara.

Tabel 2:
Tingkat tertinggi dan terendah mengenai kesadaran perempuan atas hak untuk meminta informasi

Tingkat	Negara	%
Tertinggi	Mongolia	64%
	Bangladesh	60%
	Filipina	58%
Terendah	Tiongkok	21%
	Thailand	21%
	Kamboja	28%

Sumber: GCB 2020 dari 15 negara di Asia (N: 16.637), GCB 2022 dari 8 negara di Pasifik (N: 5.130). Catatan: tiga negara tertinggi dan terendah di masing-masing kawasan berdasarkan persentase perempuan dengan kesadaran atas hak mereka untuk meminta informasi resmi.

Perlu dicatat bahwa laporan statistik tingkat negara mengungkap variasi tingkat kesadaran yang cukup besar di kalangan perempuan di seluruh kawasan. Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya 21 persen dari perempuan di Tiongkok dan Thailand yang menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk meminta informasi dari institusi publik, sedangkan di Mongolia tercatat sebanyak 64 persen. Pemahaman mengenai hambatan berdasarkan gender terhadap kesadaran atas isu-isu ini dieksplorasi di sejumlah FGD.

Singkatnya, analisis data GCB di kawasan Asia dan Pasifik secara garis besar menyatakan bahwa gender tidak begitu berpengaruh dalam membentuk sikap terkait korupsi atau kecenderungan membayar suap untuk sebagian besar layanan di kawasan-kawasan ini. Berdasarkan data GCB Asia, kesadaran mengenai institusi anti korupsi dan hak untuk meminta informasi dikaitkan dengan gender. Meskipun demikian, perempuan cenderung kurang menyadari keduanya dan menunjukkan kemungkinan yang kecil untuk menggunakan haknya dalam meminta informasi tersebut. Penemuan ini tampaknya bertentangan dengan penelitian yang sedang berkembang yang telah menyatakan dengan jelas bahwa pengalaman terkait korupsi memang dibentuk oleh norma-norma gender. Mengingat sifatnya yang ringkas, data survei memiliki keterbatasan kemampuan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana norma-norma gender memengaruhi cara pejabat publik memperlakukan masyarakat biasa di kawasan Asia dan Pasifik? Apa perbedaan, jika ada, antara pengalaman dimintai suap, menolak suap atau melaporkan suap bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya? Pada akhirnya, analisis data GCB terkait pelaporan pengalaman *sextortion* kepada enumerator survei menjadi membingungkan. Mengapa ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melapor bahwa mereka mengalami atau mengenal seseorang yang mengalami *sextortion*? Terakhir, apa peran norma-norma gender dalam memfasilitasi atau menggagalkan upaya-upaya untuk mengukur pihak yang paling rentan terhadap *sextortion* di tengah masyarakat? Sederet pertanyaan ini dan pertanyaan terkait lainnya dieksplorasi di FGD kami.

Credit Foto : PACAF/Flickr



4

METODOLOGI UNTUK KELOMPOK DISKUSI

Secara keseluruhan, sebanyak sepuluh FGD diadakan di Kamboja (2), Fiji (4), Indonesia (2), dan Sri Lanka (2). Terdapat total 139 peserta yang menghadiri rangkaian diskusi ini.

Tidak semua peserta diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan hanya sebagian besar dari mereka. Terdapat pembagian yang hampir rata pada peserta yang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki dan perempuan. Jumlah rata-rata peserta untuk masing-masing kelompok diskusi adalah 14 dan nilai tengahnya adalah 10.⁷¹



⁷¹ FGD di Sri Lanka jauh lebih besar (masing-masing 34 dan 27 peserta) dibandingkan FGD lain yang dilakukan. Hal ini kemungkinan besar berdampak pada diskusi. Misalnya, banyak peserta yang tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam diskusi. Namun, catatan dibuat mengenai bahasa tubuh secara keseluruhan dari kelompok-kelompok ini (untuk menandakan persetujuan/ketidaksepakatan secara luas). Tim yang terlibat dalam FGD ini memperluas partisipasinya untuk menanggapi ketertarikan terhadap proyek namun juga bertujuan untuk memasukkan beberapa sudut pandang.

Tabel 3:
Rincian kelompok diskusi

Negara	Tanggal	Lokasi	Komposisi
Kamboja (2)	26 Juni 2023	Phnom Penh	Perempuan
	29 Juni 2023		Laki-laki
Fiji (4)	27 Juni 2023	Suva	Perempuan
	28 Juni 2023		Laki-laki
	29 Juni 2023		LGBTQI & Kelompok dengan Disabilitas
	3 Juli 2023		Perempuan
Indonesia (2)	5 Juli 2023	Jakarta	Perempuan
	5 Juli 2023		Laki-laki
Sri Lanka (2)	11 Juli 2023	Jaffna	Perempuan / Kelompok Transgender
	20 Juli 2023	Matara	Laki-laki

Setiap kelompok diskusi difasilitasi oleh seorang moderator dengan dibantu seorang co-moderator dari Transparency International chapter nasional, yang mana banyak dari mereka berpengalaman memimpin FGD. Seluruh moderator menggunakan panduan moderasi, yang berfungsi sebagai “naskah mentah” untuk memastikan bahwa FGD membahas pertanyaan inti dan topik yang sama. Pertanyaan inti dan topik tersebut meliputi:

- sejauh mana perbedaan perlakuan yang diberikan oleh pejabat publik terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk dalam pengalaman mereka dimintai suap atau terpaksa membayar suap dan dalam melaporkan penyuapan
- pengalaman *sextortion* berdasarkan gender dan sejauh mana kesadaran tentang *sextortion* dipengaruhi oleh gender
- kesadaran perempuan tentang hak mereka untuk meminta informasi dari institusi publik dan kecenderungan mereka untuk mengajukan hak tersebut

Moderator didorong untuk memfasilitasi diskusi bebas dan membantu peserta untuk mengeksplorasi hubungan, membagikan pengalaman pribadi, dan tidak terlalu terpaku pada “naskah”. Sedangkan, co-moderator berfokus mencatat. Seluruh FGD dilaksanakan dalam bahasa yang dominan digunakan di lokasi masing-masing.

Peserta

Mengingat sensitivitas dari topik yang didiskusikan, dan dalam rangka menciptakan ruang yang aman di mana para peserta dapat merasa terbuka untuk berpendapat dengan bebas, sebagian besar FGD diadakan dengan memisah peserta laki-laki dan perempuan. Di Fiji, di mana empat FGD diselenggarakan, dilakukan upaya untuk mengumpulkan para peserta dengan usia yang sama. Setiap chapter dari Transparency International merekrut peserta untuk FGD mereka masing-masing. Hal ini dilakukan pula dengan menjangkau jaringan pribadi dan profesional. Banyak peserta FGD yang bekerja di organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada beragam topik, seperti hak-hak perempuan, hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender, tata kelola dan pemberian layanan. Karyawan dan pejabat pemerintah berpartisipasi dalam sejumlah kelompok diskusi, bersama dengan jurnalis, peneliti, guru, murid, dan orang-orang yang tidak bekerja. Seluruh peserta telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan banyak dari mereka yang berpendidikan sarjana.

Partisipasi dalam Kelompok Diskusi Terfokus

Sebelum FGD, seluruh peserta menerima selebaran informasi yang menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk "mengkontekstualisasi dan mengeksplorasi lebih jauh sikap dan pengalaman dengan pejabat publik berdasarkan gender." Topik utama diskusi digarisbawahi. Para responden diinformasikan bahwa masukan mereka akan tetap dijaga kerahasiaannya, dan bahwa mereka tidak harus menjawab pertanyaan yang membuat mereka tidak nyaman dan boleh meninggalkan diskusi kapan saja. Seluruh responden menandatangani formulir persetujuan yang mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca lembar informasi dan partisipasi mereka bersifat sukarela. Hanya sebagian kecil dari peserta yang tetap diam selama beberapa babak dalam sejumlah FGD; sebagian besar tampak berbicara dengan bebas dan antusias. Tidak ada peserta yang meninggalkan diskusi lebih awal.

Pengakuan terkait Batasan

FGD merupakan metode penelitian yang penting untuk mengeksplorasi sikap dan persepsi yang umumnya dipegang. Meskipun demikian, seperti halnya metode penelitian lainnya, FGD memuat cukup banyak batasan. FGD hanya dapat mengakomodasi jumlah peserta yang relatif sedikit. Konsekuensinya, FGD tidak dirancang untuk mengukur sikap dan keyakinan yang dapat digeneralisasi. Mengingat sebagian besar dari responden kami berpendidikan tinggi, penemuan ini tidak boleh dianggap sebagai representasi dari populasi negara mereka, apalagi di kawasan yang lebih luas. Penelitian di masa mendatang dapat mengembangkan proyek ini dengan cara memfasilitasi FGD dengan segmen populasi yang berbeda.

Beberapa peserta mungkin merasakan tekanan sosial selama jalannya FGD, yang dapat menghambat kebersediaan mereka untuk bersuara. Karena sifat topik yang sensitif, hal ini mungkin memang terjadi, terutama selama diskusi tentang *sextortion* berlangsung. Sebagai bentuk klarifikasi, tidak ada pertanyaan tentang pengalaman pribadi terkait *sextortion* yang diajukan di dalam FGD kami. Semua peserta di seluruh FGD, kecuali satu, tampak nyaman mendiskusikan topik ini. Sebagai pengecualian, dalam FGD yang melibatkan sekelompok perempuan di Kamboja, co-moderator melaporkan bahwa bahasa tubuh peserta mengisyaratkan bahwa sebagian kecil dari mereka merasa tidak nyaman selama beberapa babak diskusi mengenai *sextortion*. Terlebih, sebagian besar pihak dalam kedua FGD di Kamboja sepakat bahwa perempuan umumnya merasa kurang nyaman ketika membahas tentang seks secara berkelompok.

Terakhir, setiap laporan penelitian berdasarkan data FGD secara alami memiliki keterbatasan kemampuan dalam merefleksikan seluruh pendapat yang disuarakan. Karena alasan ini, laporan cenderung menekankan poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama dalam FGD terkait tujuan penelitian ini. Tentunya, mengingat jangkauan negara tempat FGD diselenggarakan, masing-masing lokasi memiliki karakteristik ekonomi, politik, dan kultural yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Penting untuk dicatat bahwa banyak diskusi, di berbagai negara, menekankan tema yang sama atau yang sangat mirip. Jika ada, maka dilakukan upaya untuk melaporkan poin-poin sikap atau ide yang tampaknya berlaku khusus di negara tertentu.

5

NORMA-NORMA GENDER DAN EKSPEKTASI PEREMPUAN

Tinjauan pustaka yang dipaparkan di Bagian 2 memperjelas bahwa norma-norma gender mendasari pengalaman berdasarkan gender dengan institusi publik dan pola ketidaksetaraan gender yang lebih luas.

Tekanan yang dirasakan akibat adanya norma gender

Di seluruh FGD yang diselenggarakan, para peserta secara umum sepakat bahwa masih terdapat tekanan yang mendalam bagi perempuan untuk menjadi pengurus utama dalam rumah tangga, dan untuk melakukan sebagian besar atau seluruh pekerjaan rumah dan kewajiban memasak, sementara laki-laki lebih cenderung diperkirakan menghindari tugas-tugas tersebut. Norma gender di sekitar femininitas, yang tampaknya berlaku di keempat negara, digambarkan menekan perempuan untuk bertindak "sopan", menjadi pribadi yang tertutup secara sosial, dan tidak menyatakan pendapat yang tegas. Sebaliknya, laki-laki menghadapi tekanan untuk mengambil peran pemimpin dan berpendapat secara blak-blakan. Cerminkan ini sejalan dengan pengamatan lain terkait norma yang dominan di dalam kawasan, sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2.



Credit Foto : blogs.lse.ac.uk

Terdapat kesamaan pandangan di antara para peserta di kelompok diskusi Indonesia, Kamboja, dan Fiji bahwa norma gender dan ekspektasi telah sedikit berubah atau mulai berubah bagi beberapa perempuan. Di suatu kelompok diskusi yang diselenggarakan dengan sekelompok perempuan usia muda di Fiji, contohnya, hasil pengamatan menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih mungkin untuk mencari pekerjaan di luar rumah dibandingkan dengan dulu. Hal ini telah menggeser ekspektasi sosial bagi sejumlah perempuan. Meskipun demikian, semua sepakat bahwa, secara umum, status perempuan di tengah masyarakat masih tertinggal di belakang status laki-laki.

Mengingat akan pentingnya, FGD pertama-tama mengeksplorasi keyakinan peserta tentang bagaimana norma gender berlaku di negara mereka masing-masing dalam membentuk status sosial dan ekspektasi masyarakat.

Melanggengkan status quo yang tidak setara

Sejalan dengan literatur yang lebih luas, sebagian besar peserta FGD setuju bahwa norma-norma gender di negara mereka berkontribusi melanggengkan status quo yang menyebabkan banyak perempuan kurang nyaman, dan kurang memiliki waktu dan energi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap, proses pembuatan kebijakan, dan dirugikan dalam hal kesempatan kerja.

“Di tengah masyarakat, perempuan tidak diharapkan untuk berpendapat. Perempuan seringkali tidak diikutsertakan dalam diskusi penting, termasuk proses pembuatan kebijakan. Bahkan ketika perempuan mengalami ketidakadilan, sangat sulit bagi mereka untuk bangkit dan angkat bicara tanpa disalahkan.”

Peserta perempuan (Indonesia)

“Pertumbuhan karir bagi perempuan terhalang oleh pekerjaan rumah tangga atau beban keluarga. Sejumlah perempuan harus berhenti bekerja setelah melahirkan agar dapat merawat bayi mereka.”

Peserta perempuan (Kamboja)

Beberapa FGD menyimpulkan bahwa norma-norma gender melanggengkan dominasi laki-laki dalam peran-peran penting di sektor politik, pemerintahan, NGO, dan sektor privat. Hal ini dinilai berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender, secara lebih luas, karena perempuan tetap kurang terwakili secara proporsional dan menjadi pemeran pendukung di institusi serupa.

“Banyak orang yang masih berpikir bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, perempuan tidak mampu menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan, perempuan yang belum menikah pun harus merawat keluarganya.”

Peserta perempuan (Indonesia)

“Sejumlah wilayah di Fiji masih menganggap bahwa perempuan seharusnya berada di dapur dan tidak boleh memasuki dan berpartisipasi dalam perundingan masyarakat.”

Peserta perempuan (Fiji)

Berdasarkan sejumlah pengukuran, perempuan kurang terwakili di jabatan-jabatan pemimpin di seluruh kawasan. Perempuan hanya menempati 20 persen kursi di parlemen nasional dan perwakilan mereka di posisi manajerial di sektor privat jauh di bawah paritas (20 persen). Di tingkat pemerintah daerah, keterwakilan perempuan berada di bawah rata-rata global (36 persen) di sebagian besar negara Asia-Pasifik.⁷² Eksklusi berbasis gender dipahami berperan untuk melemahkan peluang proses pembuatan kebijakan dalam mencapai solusi kebijakan efektif yang peka terhadap pengalaman hidup perempuan.⁷³

Persinggungan

Banyak kelompok diskusi yang membahas tentang dampak dari dimensi persinggungan. Sebagai contoh, terdapat kesamaan pandangan bahwa perempuan yang beruntung secara ekonomi di Indonesia menghadapi ekspektasi sosial yang berbeda, terutama perihal bekerja di luar rumah dan bahkan dalam mengemban jabatan pemimpin. Meskipun demikian, tingkatan dari pengalaman hak istimewa ini dinilai memiliki batasan, terutama dalam kaitannya dengan objektifikasi seksual terhadap perempuan:

⁷² UN Women (2023b). Snapshot of Women's Leadership in Asia and the Pacific.

⁷³ Rhode, D. (2017). Women and leadership (Oxford University Press).

“Perempuan di Indonesia selalu diobjektifikasi terlepas dari status sosial kami. Bahkan jika perempuan tersebut adalah presiden ataupun mantan presiden.

Peserta perempuan (Indonesia)

Kesamaan pandangan juga ditemukan pada kelompok diskusi yang melibatkan perempuan dengan usia lebih tua di Fiji dan kelompok diskusi dengan peserta laki-laki di Kamboja bahwa perempuan yang tinggal di pedesaan sangat mungkin terdampak secara tidak proporsional oleh norma-norma gender, dengan pemahaman bahwa norma tersebut mengakar di masyarakat pedesaan. Seorang peserta di kelompok diskusi lain di Fiji mendiskusikan pengalaman interseksional tiga dimensi tentang menjadi seorang perempuan, menyandang disabilitas, dan hidup di wilayah pedesaan, yang dikaitkan dengan tekanan untuk tidak memelopori gelombang perubahan atau berpendapat secara publik:

“Menurut saya, dari keluarga disabilitas, lingkungan pedesaan seringkali memandang kami, disabilitas kami sebagai seorang perempuan, [kemudian mereka berpikir atau berkata] ‘oh tidak, Anda terlahir sebagai perempuan dengan disabilitas.’ Namun seiring berjalannya waktu, saya rasa sudah waktunya bagi Anda untuk bersuara kecuali atau sampai kami memberi tahu para pembuat kebijakan, atau siapa pun, bahwa kami harus berpendapat. Bukan untuk diberi tahu, ‘oh karena disabilitas Anda, Anda tidak bisa berpendapat sama sekali.’

Peserta perempuan (Fiji)

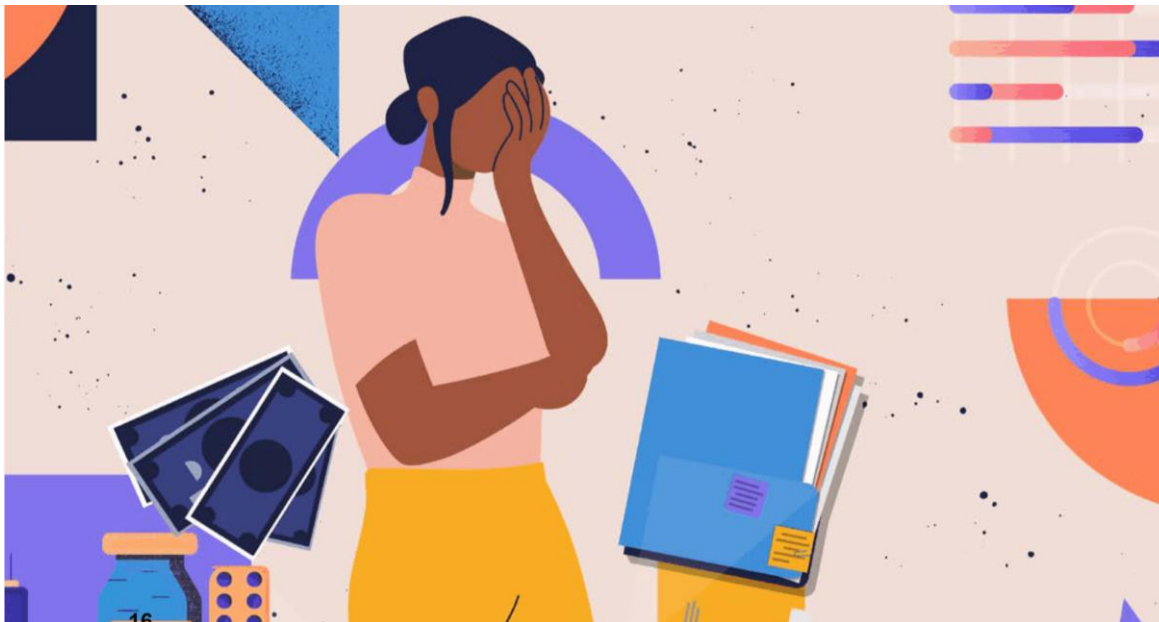
Sebagai kesimpulan, tampaknya terdapat suatu tren kawasan, karena semua FGD, dengan cara yang sama, menguraikan tentang bagaimana norma-norma gender dan ekspektasi berdasarkan gender memelihara sistem ketidaksetaraan gender, yang berdampak terhadap kehidupan dan kesempatan laki-laki dan perempuan.

6

PERLAKUAN BERDASARKAN GENDER OLEH PEJABAT PUBLIK DAN PENGALAMAN KORUPSI

Dengan mengembangkan tema yang telah disajikan di bagian sebelumnya, seluruh FGD membuat hubungan eksplisit antara bagaimana norma-norma gender dominan membentuk pengalaman yang orang miliki dengan pejabat publik dan dengan korupsi.

FGD memperjelas bahwa gender memberikan dampak yang dinamis terhadap pola korupsi. Peserta diskusi melaporkan bahwa perempuan, dan terutama perempuan yang termarginalisasi, seringkali diperlakukan dengan lebih buruk oleh pejabat publik, memiliki sumber kerentanan berdasarkan gender terhadap korupsi dan *sextortion*, dan mengalami tingkat intimidasi yang lebih tinggi dalam pertukaran suap.



Perlakuan yang diberikan oleh pejabat publik

Hampir di seluruh FGD, peserta secara umum sepakat bahwa laki-laki memperoleh perlakuan yang lebih baik ketika berinteraksi dengan pejabat publik. Banyak yang menyetujui bahwa perempuan cenderung tidak ditanggapi secara serius dan tidak dihargai, dan lebih sering dicecar pertanyaan atau ditantang ketika berusaha mengakses layanan dasar. Peserta dalam suatu kelompok diskusi di Sri Lanka melaporkan bahwa perempuan seringkali tidak diprioritaskan dalam antrian di institusi publik dan diminta untuk menunggu lebih lama daripada laki-laki. Para peserta di suatu FGD di Kamboja mengajukan hipotesis bahwa laki-laki mendapatkan perlakuan yang lebih baik karena komunikasi mereka lebih mudah atau karena memiliki hubungan yang lebih baik dengan pejabat publik, yang sebagian besar juga merupakan laki-laki. Kelompok diskusi di Sri Lanka dan Fiji menyuarkan pendapat yang berbeda. Para peserta berpendapat bahwa perempuan dapat memperoleh perlakuan istimewa ketika pejabat publik laki-laki tertarik kepada mereka secara seksual. Hal ini secara paradoks mengindikasikan posisi istimewa bagi perempuan yang "menarik" dan bahwa perempuan tersebut lebih sering diobjektifikasi oleh pejabat publik laki-laki.

Selain itu, sejumlah FGD menggarisbawahi pentingnya persinggungan. FGD tersebut menekankan bahwa perempuan yang menikmati berbagai hak istimewa diperlakukan dengan lebih baik dan lebih hormat daripada perempuan yang termarginalisasi. Memang, pengamatan ini menginspirasi penggalian literatur yang lebih luas untuk dapat melihat lebih jauh melampaui faktor pengaruh gender semata.⁷⁴ Pada topik ini, dua kelompok diskusi – salah satu kelompok perempuan di Kamboja dan sebuah kelompok yang beragam di Fiji – mengamati bahwa pejabat publik selalu melecehkan pekerja seks dan polisi tidak menganggap serius laporan mereka terkait pemerkosaan atau pelecehan lainnya. Perlakuan tersebut dilaporkan menyebabkan pekerja seks menghindari pejabat publik, bahkan setelah mereka mengalami penyerangan seksual. Dengan nada serupa, FGD di Fiji, Kamboja, dan Sri Lanka sepakat bahwa kelompok LGBTQI diperlakukan secara buruk oleh pejabat publik, seringkali diiringi dengan kekerasan dan penyerangan seksual:

⁷⁴ Bullock, J. and Jenkins, M. (2019). *Corruption and marginalisation* (Transparency International).

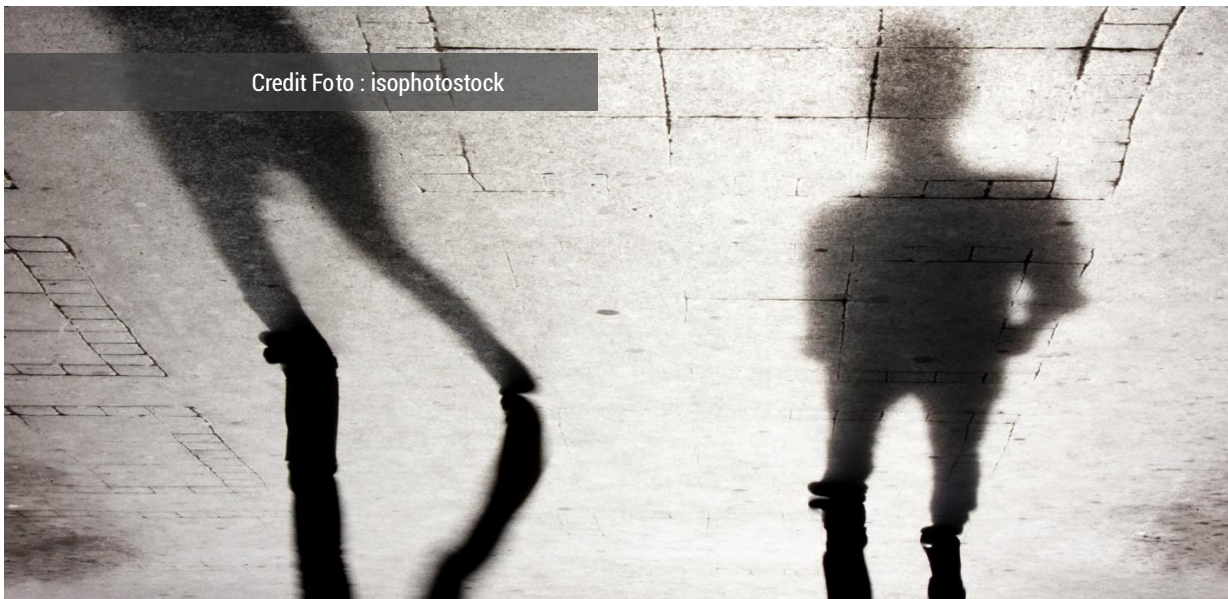
Sebuah kelompok diskusi Fiji mencatatkan bahwa perempuan dengan disabilitas tidak dihormati dengan tingkatan yang sama oleh pejabat publik dibandingkan dengan rekan mereka yang tidak menyandang disabilitas. Hipotesis yang diajukan adalah karena mungkin pejabat publik tidak dilatih untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas

“Sejujurnya, perlakuannya selalu berbeda. Ketika Anda berjalan dengan penampilan laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, orang-orang akan tertawa di kanan-kiri Anda. Jika bukan itu yang terjadi, mungkin pelayanannya yang menjadi ditunda atau justru Anda sedang diabaikan. Jadi, ini adalah hal-hal yang kami, sebagai komunitas, hadapi selama bertahun-tahun, terutama baik komunitas pekerja seks maupun LGBTIQ. Hal-hal inilah yang menghalangi kami untuk mengakses pelayanan dan menghentikan kami untuk benar-benar mengaksesnya.”

Peserta Fiji (peserta ragam)

“Ketika dikriminalisasi, para pekerja seks akan dibawa ke kantor polisi dan harus menghabiskan waktu di sel sementara pihak lain bebas untuk keluar. Begitu juga dengan layanan kesehatan karena perlakuannya selalu berbeda. Ketika seorang transgender datang, tawa cekikikan staf akan terdengar dan pelayanan menjadi tertunda... pekerja seks dan mereka yang menyandang disabilitas juga menghadapi penundaan layanan.”

Peserta Fiji (peserta ragam)



Dinamika berbasis gender yang mendasari kerentanan terhadap penyuapan dan *sextortion*

FGD memperjelas bahwa penyuapan merupakan fakta kehidupan bagi semua peserta, terlepas dari identifikasi gender apa pun. Diskusi yang berlangsung membahas bagaimana ekspektasi sosial berdasarkan gender membentuk pengalaman unik perempuan. Perlu dicatat bahwa diskusi mengenai topik ini berfokus pada pengalaman perempuan, alih-alih pengalaman laki-laki, kelompok transgender atau gender *non-conforming*.⁷⁵ Pada contoh yang pertama, sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu *sextortion*, FGD di Indonesia dan Sri Lanka mengamati bahwa permintaan suap secara inheren didasarkan pada gender karena perempuan lebih cenderung untuk dimintai keuntungan yang bersifat seksual, sedangkan pendekatan yang dilakukan kepada laki-laki selalu melibatkan uang atau barang.

"Perempuan tidak hanya dimintai uang, tetapi juga seks.

Peserta perempuan (Indonesia)

FGD dari semua negara menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban suap atau dimanfaatkan secara seksual karena mereka dipandang "lebih lemah" daripada laki-laki. Banyak dari norma-norma gender yang dibahas di bagian sebelumnya yang mendorong perempuan untuk tidak vokal dalam menyuarakan pendapatnya dan bersikap pasif atau pendiam. Norma-norma tersebut dianggap telah menguatkan stereotip pejabat publik bahwa perempuan tidak memiliki "keberanian" untuk menolak permintaan suap atau *sextortion*. Hal ini memberi kesan bahwa mereka adalah "sasaran empuk" untuk jenis-jenis korupsi semacam ini. Stereotip semacam itu mungkin berhubungan dengan observasi yang dilakukan pada saat FGD bahwa perempuan lebih sering ditanyai saat mereka mencari layanan dasar. Hasil observasi lainnya dari FGD mengungkap bahwa pejabat laki-laki sering berusaha mengintimidasi perempuan secara fisik maupun verbal demi kepentingan mereka.

"Jika dibandingkan laki-laki, perempuan menjadi sasaran untuk dimintai uang atau pungutan atas layanan yang mereka butuhkan. Contohnya, istri saya dimintai uang di pintu masuk perbatasan, sedangkan saya tidak pernah mengalami praktik suap semacam itu."

Peserta laki-laki (Kamboja)

⁷⁵ Sebagai pengecualian dalam kelompok fokus laki-laki di Indonesia, kelompok ini secara umum sepakat bahwa kerentanan laki-laki terhadap suap berakar pada persepsi gender bahwa laki-laki bertanggung jawab atas keuangan keluarga..

“Perempuan lebih sering dimintai suap daripada laki-laki karena perempuan jarang diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide atau membuat keputusan di dalam keluarga sejak kecil. Kebiasaan semacam ini juga mempengaruhi cara mereka berhadapan dengan pejabat publik yang melakukan suap.”

Peserta perempuan (Kamboja)

“Perempuan cenderung melihat seluruh spektrum sosial di dalam keluarga dan komunitasnya, sedangkan laki-laki cenderung lebih fokus pada hal-hal spesifik. Jadi ketika perempuan keluar dari zona nyamannya di rumah, mereka ke luar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga pada saat ada hal-hal seperti itu (permintaan suap), mereka menanggungnya sendiri. Jika saya melakukan ini, saya bisa membantu keluarga saya, saya bisa menutup kebutuhan ini. Hal ini juga dilengkapi dengan ekspektasi sosial di mana Anda melihat perempuan yang bekerja dengan banyak tekanan dan biasanya berakhir dengan penyuapan.”

Peserta dari Fiji (beragam peserta)

Norma-norma gender seputar pengasuhan juga merupakan faktor yang membentuk pengalaman penyuapan dan *sextortion*. Misalnya, dalam kelompok diskusi Kamboja dan Indonesia, peserta setuju bahwa perempuan lebih mungkin dimintai suap atau dimanfaatkan secara seksual untuk layanan yang berhubungan dengan pengasuhan, seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh spesifik, ada kesepakatan umum di dua kelompok diskusi di Indonesia bahwa laki-laki lebih jarang menjadi sasaran penyuapan dari pejabat pendidikan karena mereka dianggap bukan sebagai orang yang “bertanggungjawab atas pengasuhan anak.” Beberapa peserta mencatat bahwa karena norma gender yang sudah mengakar di sekitar pengasuhan, perempuan mungkin lebih mudah untuk terlibat dalam korupsi demi mengamankan kebutuhan dasar bagi keluarganya.


Interseksionalitas dan pengalaman dengan korupsi

Banyak dari kelompok diskusi yang membahas dampak dari dimensi interseksionalitas terhadap suap. Para peserta berpendapat bahwa pekerja seks dan perempuan miskin lebih rentan terhadap permintaan suap (FGD di Kamboja), dan pekerja seks khususnya rentan terhadap *sextortion* (FGD di Indonesia). Di Fiji, peserta berhipotesis bahwa perempuan pedesaan lebih rentan karena mereka cenderung kurang memiliki pengetahuan atau diasumsikan kurang paham tentang hak-hak mereka, sehingga dipandang sebagai “sasaran empuk” untuk suap.

Norma gender dan *sextortion*

FGD di semua negara menekankan peran yang dimainkan oleh norma gender dalam menunjang *sextortion*. Terdapat kesepakatan umum di Fiji bahwa akar dari *sextortion* adalah norma-norma gender yang menormalisasi laki-laki untuk “bermuatan seksual” dan untuk mengobjektifikasi perempuan secara seksual. Kedua kelompok baik di Kamboja maupun Sri Lanka mencatat bahwa pejabat publik sering merasa percaya diri bahwa korban tidak akan melapor *sextortion* karena malu. Konsekwensinya, impunitas terhadap *sextortion* terus terjadi. Masalah tentang bagaimana pelaporan *sextortion* juga bersifat gender akan dibahas secara detil di bagian 8.

Ringkasnya, dapat disimpulkan dari FGD bahwa perempuan di wilayah-wilayah tersebut—dan dari beberapa kelompok perempuan marjinal khususnya—mendapat tekanan yang lebih besar untuk membayar suap atau terlibat dalam *sextortion* atas nama orang-orang yang mereka sayangi dan dipandang sebagai “sasaran empuk” suap. Selain itu, FGD juga mencatat bahwa bagi banyak perempuan, pengalaman dengan pejabat publik diwarnai dengan intimidasi dan serangan. Pola-pola gender seperti itu memiliki konsekwensi penting yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Para pengamat sebelumnya juga telah mengungkap bahwa perempuan terutama yang berasal dari kelompok marjinal mungkin takut dengan pertukaran semacam itu sehingga mereka lebih memilih untuk pergi tanpa memperoleh layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum.^{76 77}



Credit Foto : Palla / freeimages.com

⁷⁶ Kubbe, I. and Merkle, O. (2022).

⁷⁷ Hossain, N., Nyami Musembi, C. and Hughes, J. (2010).

7

DINAMIKA GENDER DALAM PELAPORAN DAN PENOLAKAN UNTUK TERLIBAT DALAM KORUPSI

Semua FGD menyebutkan secara jelas bahwa Sebagian besar orang, terlepas dari jenis kelamin, tidak melaporkan Tindakan korupsi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap tindak lanjut pasca laporan dan kekhawatiran tentang kerahasiaan atau keamanan data pribadi.

Pelanggaran kerahasiaan dapat menyebabkan pembalasan. Faktor-faktor lain yang disebutkan oleh para peserta adalah kurangnya kesadaran akan saluran pelaporan, kesulitan dalam pembuktian Tindakan korupsi, dan proses litigasi yang cukup memakan waktu dan biaya. Lebih lanjut, sejumlah peserta menyatakan bahwa orang tidak mungkin menolak untuk membayar suap karena banyak orang sudah membayar suap.

“95 persen masyarakat mau membayar suap demi melancarkan urusannya atau untuk menghindari penalti. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menolak membayar suap karena mereka merasa tidak berdaya.”

Peserta laki-laki (Sri Lanka)

Beberapa kelompok FGD membahas mengapa pelaporan dan penolakan untuk terlibat dalam korupsi dapat bersifat gender. Norma gender sekali lagi tercatat sebagai hal yang berpengaruh. Sebagai contoh, kelompok FGD di Kamboja dan Indonesia menyebutkan bahwa laki-laki diasosiasikan dengan sikap blak-blakan dan bahkan menentang orang lain. Oleh karenanya, laki-laki lebih mungkin untuk melaporkan atau menolak terlibat dalam korupsi daripada perempuan, yang diasosiasikan untuk melakukan hal sebaliknya.

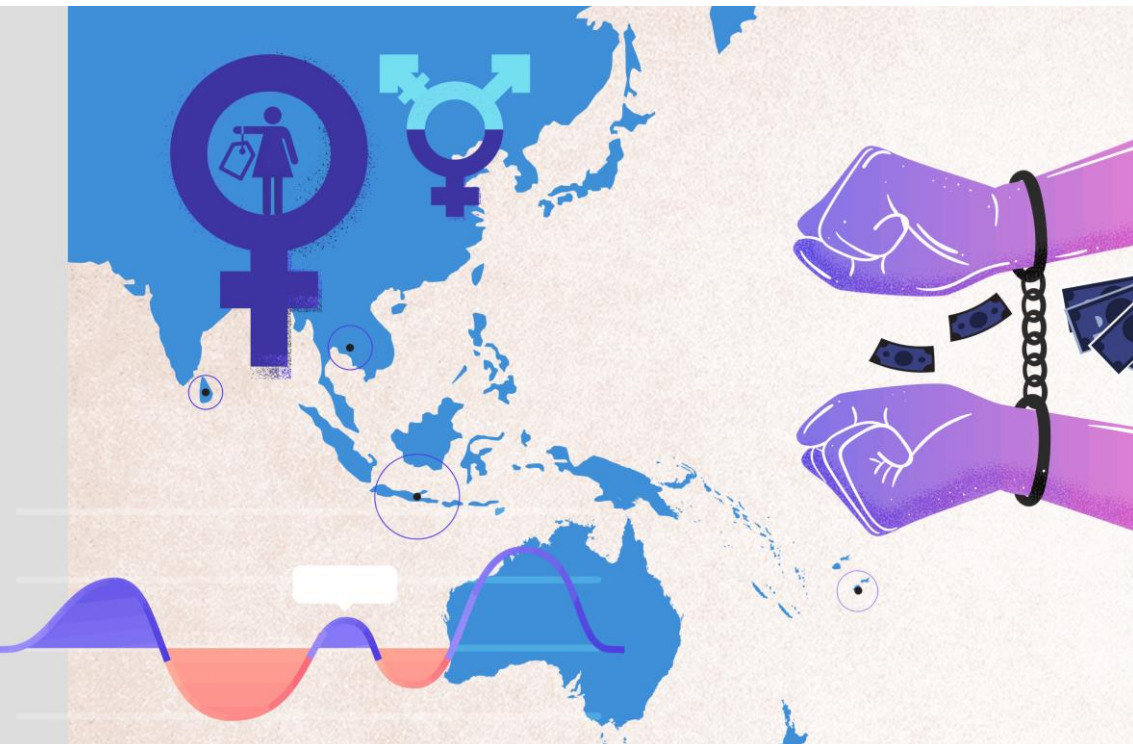
Lebih jauh, norma-norma di sekitar pengasuhan dianggap membentuk kesediaan untuk melapor. Dalam FGD di Indonesia dan Sri Lanka, disebutkan bahwa perempuan enggan melaporkan korupsi karena mereka takut pelaporannya akan membahayakan akses terhadap layanan yang dibutuhkan keluarganya di masa depan. Observasi terkait namun sedikit berbeda muncul dari Fiji dimana para peserta menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung khawatir terhadap kosekwensi yang dihadapi keluarga pelaku apabila pelaku korupsi dihukum. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak melaporkan korupsi.

"Tercatat bahwa sedikit perempuan yang melapor atau menolak membayar suap dibandingkan jumlah laki-laki karena mereka tidak memiliki keberanian untuk berurusan atau menentang pejabat public yang melakukan suap."

Peserta laki-laki (Kamboja)

"Cara perempuan diperlakukan ketika mereka mengajukan keluhan berbeda dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua, lebih lemah, kurang diprioritaskan, dan tidak dianggap serius."

Peserta laki-laki (Indonesia)



Kesadaran gender di sekitar hak-hak dan lembaga akuntabilitas

Sebagaimana disebutkan di Bagian 2, analisis sebelumnya tentang data survei GCB Asia mengungkap bahwa perempuan di Asia cenderung tidak menyadari hak mereka untuk meminta informasi dari lembaga-lembaga publik dan dari komisi anti korupsi di negara mereka.⁷⁸ Pola kesadaran gender tersebut memiliki konsekuensi langsung dan penting. Sebagai contoh, perempuan di Asia kecil kemungkinannya untuk menggunakan hak ini. Berkaca dari temuan-temuan statistik ini, FGD kami membahas potensi hambatan gender terhadap kesadaran hak-hak akuntabilitas di negara mereka masing-masing.

Banyak dari kelompok FGD (semua kecuali kelompok FGD di Sri Lanka) setuju bahwa ekspektasi sosial seputar pengasuhan mempengaruhi tingkat kesadaran atas hak akuntabilitas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perempuan yang sibuk dengan tanggung jawab pengasuhan mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk mencari informasi tentang hak-hak mereka atau lembaga akuntabilitas. Selain itu, disebutkan juga bahwa laki-laki relatif cenderung lebih memprioritaskan pencarian informasi karena mereka memiliki lebih banyak waktu dan adanya ekspektasi sosial yang lebih tinggi bagi mereka untuk melakukannya. Lebih lanjut, kelompok FGD di Kamboja dan Fiji berhipotesis bahwa perempuan mungkin kurang mendapat informasi tentang bagaimana cara melapor dan di mana harus melapor.

Kelompok FGD di Kamboja dan Fiji menyimpulkan bahwa perempuan terlalu malu untuk mengajukan pertanyaan tentang anti korupsi dan hak atas informasi dan lebih enggan untuk meminta informasi karena norma gender seputar sifat perempuan yang pasif dan penurut. FGD di Fiji juga mengamati bahwa tidak banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor publik untuk meningkatkan kesadaran seputar isu-isu tersebut bagi perempuan. Mereka meragukan bahwa upaya tersebut dapat menjangkau perempuan pedesaan.

Sejalan dengan hal tersebut, FGD di Indonesia menyimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender dapat membentuk kesadaran akan isu-isu semacam ini secara lebih luas. Saran yang dapat diberikan adalah rendahnya persentase akses perempuan terhadap pendidikan berarti lebih tinggi persentase buta huruf pada perempuan. Pada akhirnya, buta huruf melemahkan kesadaran akan hak. Tingkat kesetaraan gender dalam melek huruf di wilayah-wilayah ini memang bervariasi. Namun, rata-rata buta huruf pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.⁷⁹

⁷⁸ Pertanyaan serupa tidak ditanyakan dalam survei Pasifik.

⁷⁹ UNESCO (2020). Asia-Pacific Overview: Sustainable Development Goal 4, Target 4.6.

Sebagai kelompok, perempuan pedesaan secara tidak proporsional mengalami buta huruf, termasuk buta huruf digital.⁸⁰ FGD juga mencatat bahwa buta huruf pada perempuan pedesaan mungkin menghadirkan tantangan khusus untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak yang berfokus pada akuntabilitas.

Credit Foto : saiko3p / Freepik



⁸⁰ UNICEF (2020). Girls Literacy in the East Asia and Pacific Region (UNICEF).

8

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN KESIMPULAN

Laporan ini mengeksplorasi pengaruh gender pada pengalaman dengan pejabat publik dan korupsi di empat negara di Asia Pasifik.

Temuan-temuan ini diharapkan dapat mendukung mereka yang bekerja untuk mengendalikan korupsi di Kawasan ini. Laporan ini memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana gender membentuk kerentanan terhadap korupsi dan kesiapan untuk melaporkannya, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi yang ada.

Kesimpulan ini mencakup rekomendasi yang diambil dari temuan penelitian. Langkah-langkah tersebut akan membantu mengarusutamakan gender ke dalam upaya anti korupsi dan menyoroti apabila diperlukan kebijakan tambahan dan penelitian khusus.

Untuk pemerintah

- Pemerintah harus membuat mekanisme pelaporan yang peka terhadap gender dalam mekanisme pelaporan korupsi. Mekanisme pelaporan harus aman, dapat diakses oleh semua kelompok perempuan, bersifat rahasia dan tidak membuka peluang untuk melakukan pembalasan.⁸¹ Mekanisme pelaporan semacam itu akan menguntungkan semua pihak dan mungkin memberikan efek positif pada pelaporan secara umum

⁸¹ Zúñiga, N. (2020). Gender sensitivity in corruption reporting and whistleblowing (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre).

- Pemerintah perlu berinvestasi pada pelaporan yang sensitif terhadap *sextortion* dan sumber daya untuk korban. Pelaporan *sextortion* harus mengutamakan “jenis dukungan yang dibutuhkan oleh para penyintas kekerasan seksual termasuk, tapi tidak terbatas pada layanan kesehatan fisik dan psikologis, dukungan keuangan, dan bantuan hukum”.⁸² Selain itu, korban harus mendapatkan panduan hukum dan prosedural yang jelas tentang pelaporan dan informasi tentang kemungkinan biaya yang timbul. Harus ada dana untuk membantu meringankan biaya terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar.⁸³ Korban perempuan harus dapat melapor ke sesama perempuan, maka pelatihan sensitifitas gender diperlukan bagi para pejabat yang menyelidiki dan mengambil keputusan mengenai kasus-kasus yang dilaporkan.⁸⁴
- Pemerintah harus mempertimbangkan untuk mempromosikan “keseimbangan gender di antara personil di berbagai sektor dan kegiatan yang rentan terhadap *sextortion*”.⁸⁵ Dengan menerapkan ini maka seolah-olah akan mengatasi lingkungan organisasi yang melindungi para pelaku dan dapat mengatasi keprihatinan yang diangkat dalam FGD tentang berapa banyak perempuan yang rentan terhadap *sextortion* ketika mereka putus asa untuk mendapatkan layanan demi keluarga mereka.
- Pemerintah harus mengembangkan kerangka hukum untuk *sextortion*⁸⁶ agar memungkinkan penuntasan kasus-kasus dan memberikan pelatihan khusus bagi pejabat peradilan tentang *sextortion*. Adanya kerangka hukum yang tepat dan pejabat yang lebih peka terhadap masalah ini akan meningkatkan pelaporan. Program pelatihan hukum harus bertujuan untuk meningkatkan keadaran tentang *sextortion* di antara jaksa dan hakim.

⁸² Camacho, G. (2021).

⁸³ Feigenblatt, H. (2020: 35).

⁸⁴ Feigenblatt, H. (2020: 35).

⁸⁵ Feigenblatt, H. (2020: 34).

⁸⁶ Feigenblatt, H. (2020).

Untuk pelaku kebijakan dan kelompok masyarakat sipil yang fokus pada anti korupsi

- Pelaku kebijakan dan kelompok masyarakat sipil harus membedakan perempuan, khususnya mereka yang termarginalkan dalam upaya dan sistem pemerintahan anti korupsi.⁸⁷ Perempuan sering kali mengangkat isu yang beragam, tidak hanya sebagai aktor politik tetapi juga sebagai aktivis.⁸⁸ Pemberdayaan perempuan di sistem pemerintahan harus mengarahkan pada aksi yang peka terhadap pengalaman hidup perempuan.⁸⁹ Untuk kelompok perempuan yang mungkin merupakan pendatang baru dalam proses kebijakan dan pemerintahan, seperti mereka yang miskin, berasal dari daerah pedesaan atau dari kelompok marginal lainnya misalnya, usaha yang dilakukan harus mempertimbangkan pemberian dukungan dan peningkatan kapasitas seputar kepemimpinan bagi mereka.⁹⁰
- Pelaku kebijakan dan kelompok masyarakat sipil perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang *sextortion*, menentang stereotip dan norma gender yang telah terbentuk sebelumnya di kalangan masyarakat dan pejabat publik, dan menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak atas layanan, akses ke informasi, dan saluran pelaporan korupsi. Tanpa kesadaran atau pesan kampanye sensitivasi, sulit untuk mengetahui bagaimana para pelaku kebijakan dapat mengubah norma-norma yang menginformasikan pengalaman gender dalam jangka waktu singkat. Upaya peningkatan kesadaran tentang harus fokus pada penempatan *sextortion* "sebagai bentuk korupsi yang signifikan di mata pelaku kebijakan dan masyarakat".⁹¹ Apabila hal ini diterapkan, maka korban akan terdorong untuk melaporkan *sextortion* dengan aman dan menciptakan momentum untuk reformasi kebijakan yang diperlukan.⁹² Mengingat tingkat kesadaran mengenai isu ini tidak sama di wilayah ini, kampanye yang dilakukan harus disesuaikan dan ditargetkan untuk khalayak tertentu, untuk menjangkau orang-orang yang belum sadar sebagai prioritas. Selain itu, perlu upaya khusus untuk menjangkau perempuan sehingga pesan kampanye dapat tersampaikan.

⁸⁷ Transparency International (2007). Gender and Corruption: Understanding and Undoing linkages. Working paper.

⁸⁸ OSCE (2021). Gender and Corruption: What do we know? Discussion paper.

⁸⁹ Rhode, D. (2017).

⁹⁰ Camacho, G. (2021).

⁹¹ Rheinbay, J. and Chêne, M. (2016).

⁹² Rheinbay, J. and Chêne, M. (2016).

- Bagaimanapun, meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini bukanlah tugas yang mudah. Banyak penelitian yang mengungkap bahwa sulit untuk mencapai efektivitas melalui kampanye yang berpusat pada “kejahatan sosial” seperti korupsi dan kekerasan berbasis gender.⁹³ Untuk kedua topik tersebut, penelitian menunjukkan bahwa penyampaian pesan sering kali tidak efektif dan bahkan dapat menjadi bumerang.^{94 95 96} Oleh sebab itu, kampanye-kampanye ini harus dirancang dengan hati-hati dan idealnya diuji sebelum disebarluaskan, sehingga para aktor kebijakan dapat memastikan bahwa kampanye tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.^{97 98} Aktor kebijakan harus paham tentang jenis pesan anti korupsi apa yang paling efektif^{99 100} dan tentang topik *sextortion*. Pelajaran dapat diambil dari mereka yang meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender.¹⁰¹
- Aktor kebijakan dan kelompok masyarakat sipil harus berupaya membuat kebijakan anti korupsi yang peka gender dengan cara yang sesuai konteks dan memperhitungkan faktor-faktor interseksional. Pengarusutamaan gender ke dalam kerja-kerja anti korupsi yang efektif harus berbeda di berbagai wilayah karena Asia Pasifik terdiri dari banyak negara dengan pengukuhan norma gender dan ketidaksetaraan gender yang bervariasi. Maka kebijakan harus sesuai dengan konteks dan dirancang untuk mengatasi masalah-masalah spesifik di setiap negara.¹⁰²

⁹³ Peiffer, C. and Cheeseman, N. (2023). Message misunderstood: Why raising awareness of corruption can backfire (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre).

⁹⁴ Peiffer, C. and Cheeseman, N. (2023).

⁹⁵ Keller, S., Wilkinson, T. and Otjen, A.J (2014) Unintended effects of a domestic violence campaign. In *Advertising and Violence* (pp. 215-234, Routledge).

⁹⁶ Paluck, E., Ball, L., Poynton, C. and Sieloff, S. (2010). *Social norms marketing aimed at gender-based violence* (New York: International Rescue Committee).

⁹⁷ Peiffer, C. and Cheeseman, N. (2023).

⁹⁸ Baez-Camargo, C. and Schönberg, J. (2023). *Strategic anti-corruption communications: a resource for practitioners*. Working Paper 45 (Basel Institute on Governance).

⁹⁹ Peiffer, C. and Cheeseman, N. (2023).

¹⁰⁰ Baez-Camargo, C. and Schönberg, J. (2023).

¹⁰¹ Paluck, E., Ball, L., Poynton, C. and Sieloff, S. (2010).

¹⁰² Sida (2015).

- Upaya pengarusutamaan gender juga perlu mempertimbangkan interseksionalitas. FGD di semua negara menyentuh bagaimana faktor-faktor interseksional berinteraksi dengan korupsi yang bersifat gender, perempuan miskin yang tinggal di pedesaan, pekerja seks, dan kelompok transgender menjadi lebih rentan terhadap pengalaman dan dampak korupsi tertentu. Penerapan interseksionalitas membutuhkan “pemikiran di luar kategori gender biner, dan melihat bentuk-bentuk yang lebih jamak dari maskulinitas, feminitas, dan non-heteronormatif”.¹⁰³ Selanjutnya, interseksionalitas perlu mempertimbangkan dimensi identitas lainnya (misalnya di luar ras, disabilitas, usia, atau kemiskinan), seperti pengalaman para migran dan pekerja seks. Tanpa mempertimbangkan dimensi gender dan interseksional dari korupsi, kebijakan akan cenderung tidak efektif dan bahkan beresiko mendatangkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan oleh mereka yang sudah terpinggirkan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Untuk peneliti

- **Dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang gender dan korupsi di Asia Pasifik.** Sementara temuan dalam laporan ini menegaskan bahwa korupsi dan dampaknya bersifat gender, masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengalaman gender di Asia Pasifik. Penelitian harus berfokus di negara-negara yang tidak terlibat dalam penelitian ini, dan lebih luas di negara-negara yang termasuk dalam studi ini. Penelitian semacam itu penting untuk pengembangan inisiatif spesifik negara yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian tersebut juga harus dibangun berdasarkan metodologi laporan ini dan mengatasi keterbatasannya apabila memungkinkan. Logikanya sederhana: untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif, pembuat kebijakan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya tentang bagaimana dan sejauh mana pengalaman korupsi bersifat gender dan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk marjinalisasi.

¹⁰³ Camacho, G. (2021).

¹⁰⁴ OSCE (2021).

- **Siapa pun yang melaksanakan survei korupsi harus belajar dari penelitian tentang topik-topik sensitive lainnya. Mereka harus menguji apakah strategi yang dipai di bidang-bidang tersebut dapat ditransfer untuk mengukur pengalaman perempuan dengan korupsi dan *sextortion* secara lebih akurat.** Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa perempuan mungkin lebih enggan untuk mengakui bahwa mereka telah membayar suap dalam survei ketika mereka ditanya secara langsung. Hal ini karena bagi banyak perempuan, suap merupakan topik yang "sensitive" untuk dibahas. Saat ini upaya untuk menanyakan tentang *sextortion* dalam survei masih terbatas karena alasan yang sama. Penelitian survei tentang kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga dan topik sensitive lainnya telah mengembangkan sejumlah strategi metodologis untuk mengukur prevalensi masalah-masalah ini dengan menggunakan survei. Beberapa strategi ini akan bermanfaat di masa mendatang untuk membantu mengukur pengalaman pribadi dengan penyuaipan dan *sextortion*.
- **Dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang *sextortion* karena relatif langka.**¹⁰⁵ Feigenblatt¹⁰⁶ mengidentifikasi beberapa bidang di mana pemahaman yang lebih mendalam, termasuk dampak dari *sextortion* pada korban dan masyarakat, pola-pola *sextortion* pada sektor-sektor tertentu, dan apa yang memfasilitasi atau menggagalkan penuntutan. Penelitian juga harus memeriksa bagaimana interseksionalitas berpengaruh pada kerentanan dan pengalaman *sextortion*.

Untuk semua yang bekerja untuk memerangi korupsi yang bersifat gender

Tema yang jelas dalam penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh norma-norma gender yang mengakar dalam mendasari ketidaksetaraan gender dan pengalaman korupsi berbasis gender yang dialami perempuan. Implikasinya jelas: korupsi yang bersifat gender di Asia Pasifik tidak akan secara substantif berubah tanpa adanya perubahan sosial yang lebih luas. Perubahan semacam itu harus bekerja untuk menentang norma-norma gender yang toksik dan ekspektasi gender terkait. Hal ini bukan pekerjaan yang mudah dan tidak ada buku panduan yang jelas untuk diikuti yang akan menjamin perubahan yang luas di masyarakat.

¹⁰⁵ Sundström, A. & Wängnerud, L. (2021) Sexual forms of corruption and sextortion: How to expand research in a sensitive area. QoG Working Paper Series 2021:10.

¹⁰⁶ Feigenblatt, H. (2020).

Banyak rekomendasi kebijakan yang telah dibahas sejauh ini bertujuan untuk membantu mendorong jarum dengan bekerja untuk melindungi hak-hak perempuan dan kelompok marjinal lainnya dari korupsi, memperkuat tuntutan akuntabilitas, dan secara bertahap mencabut kepercayaan yang mendasari pengalaman gender dalam menghadapi korupsi. Kabar baiknya adalah bahwa para reformer anti korupsi tidak sendirian dalam membingkai ulang norma-norma dan ekspektasi gender.

Masyarakat sipil dan aktor kebijakan anti korupsi di Asia Pasifik harus mengidentifikasi, membangun hubungan, dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada gender dan memiliki tujuan perubahan sosial yang sama. Upaya untuk mengarusutamakan *sexortiohn* ke dalam program anti korupsi dan anti pelecehan seksual membutuhkan penguatan kolaborasi di kedua bidang yang saling tumpang tindih ini. Kerja koalisi semacam itu akan menjadi kepentingan bersama. Kerjasama ini mampu untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi bersama. Mengingat bahwa mengubah norma-norma sosial adalah tugas yang kompleks, maka koalisi yang semakin berkembang dan tekad yang kuat serta berkelanjutan menjadi kuncinya.

Credit Foto : Adnan Abidi / Reuters



Credit Foto : Elina Sazonava /Pexels





Transparency International Indonesia
Jl. Amil Raya No.5, RT.01 RW. 04,
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E) info_at_ti.or.id